

**DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

RENCANA KERJA

2023



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

-  www.pktl.menlhk.go.id
-  Direktorat Jenderal Pktl
-  @ditjenpktl.klhk
-  Planhutaling KLHK



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN**

Nomor: SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022

TENTANG

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penggangguhan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] Nomor 6056);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6635);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 14. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan

- Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
 22. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan.
 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2023**
- KESATU** : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 unit kerja Eselon II dan UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan perubahan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,



TRIYONO SAPUTRO
NIP. 19660619 199103 1 001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022
Plt. DIRKETUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN
NIP. 19620301 198802 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor : SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022

Tanggal : 13 Desember 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2023**

**DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**

RENCANA KERJA

2023

KATA PENGANTAR

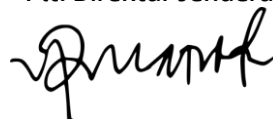
Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-4 (keempat) dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yang memuat garis besar (gambaran) target kinerja dan anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama satu tahun pada seluruh satker lingkup baik pusat maupun daerah.

Sebagaimana tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tahun 2023 yakni "Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia", Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya menyelesaikan kegiatan prioritas-prioritas utama tahun 2023 diantaranya percepatan penyelesaian tata batas kawasan hutan dalam rangka penetapan Kawasan hutan 100%, pelaksanaan *major project* pembangunan Ibukota Negara (IKN), penyiapan *safeguard* lingkungan hidup serta target prioritas nasional lainnya.

Dengan hasil capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 berjalan, dan dukungan berbagai stakeholder serta dukungan anggaran yang telah diberikan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan optimis dapat menyelesaikan target kinerja tahun 2023 yang akan dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan, diantaranya Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan melalui kegiatan (1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, (2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ; (3) Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; serta Program Kualitas Lingkungan Hidup melalui kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta mendapatkan ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Plt. Direktur Jenderal,



Ruandha Agung Sugardiman
NIP. 19620301 198802 1 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL.....	1
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR LAMPIRAN.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	4
D. PENGARUSUTAMAAN	11
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022	12
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022.....	12
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022.....	38
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023	40
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023.....	40
B. RENCANA KERJA TAHUN 2023	43
C. KERANGKA PENDANAAN BELANJA TAHUN 2023	55
D. PENGUATAN BELANJA TAHUN 2023 (<i>BUDGET TAGGING</i>).....	59
BAB IV. PENUTUP	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sebaran Nomenklatur, Lokasi dan Wilayah Kerja BPKHTL	8
Tabel 2	Kegiatan Pengembangan SDM Lingkup Ditjen PKTL (s.d November 2022).....	10
Tabel 3	Capaian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2021	14
Tabel 4	Prognosis Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2022	17
Tabel 5	Target dan Realisasi Penerimaan PNBP-PKH tahun 2009 s.d. tahun 2022.....	25
Tabel 6	Lokasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif terkait dengan Air	32
Tabel 7	Serapan Anggaran Ditjen PKTL tahun 2021	38
Tabel 8	Prognosis Serapan Anggaran Ditjen PKTL tahun 2022	39
Tabel 9	Dukungan Ditjen PKTL tahun 2023 dalam Prioritas Nasional	41
Tabel 10	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023	47
Tabel 11	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan tahun 2023.....	51
Tabel 12	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen tahun 2023.....	54
Tabel 13	Sebaran KRO-RO per kegiatan Tahun 2023	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sebaran SDM Lingkup Ditjen PKTL (orang) sd November 2022	9
Gambar 2 Dukungan Ditjen PKTL dalam Pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>)	11
Gambar 3 Capaian Kinerja Ditjen PKTL tahun 2021	14
Gambar 4 Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan (s.d. November 2022).....	18
Gambar 5 Data Potensi Tegakan Hutan Indonesia (sd 2021)	20
Gambar 6 Hasil Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia tahun 2020	21
Gambar 7 Diagram Perkembangan Dorestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990-2020	21
Gambar 8 Revisi Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber TORA.....	26
Gambar 9 Capaian Nilai SAKIP Ditjen PKTL.....	35
Gambar 10 Perubahan Anggaran tahun 2021	38
Gambar 11 Perubahan Anggaran tahun 2022	39
Gambar 12 Tema dan Sasaran Pembangunan RKP 2023 (Perpres 108 Tahun 2022).....	40
Gambar 13 Target Kinerja Ditjen PKTL tahun 2023	44
Gambar 14 Sebaran Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2023.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2023	63
Lampiran 2 Dukungan/Modalitas Kegiatan Tahun 2023 Lingkup Ditjen PKTL....	70
Lampiran 3 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2023 ..	79
Lampiran 4 Rincian Lokus Pelaksanaan Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKHTL.....	85
Lampiran 5 Rincian Lokus Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan SDH di wilayah BPKHTL	86
Lampiran 6 Rincian Lokus Pelaksanaan Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di wilayah UPT BPKHTL	87
Lampiran 7 Rincian Lokus Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dampak Lingkungan di wilayah UPT BPKHTL.....	88

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pencapaian target Renstra Revisi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024 telah dilakukan pada 3 (tiga) tahun terakhir dengan berbagai langkah strategis dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, didalam masa pandemi Covid-19 yang telah melanda bangsa Indonesia yang tentunya sangat berdampak dalam perekonomian Indonesia.

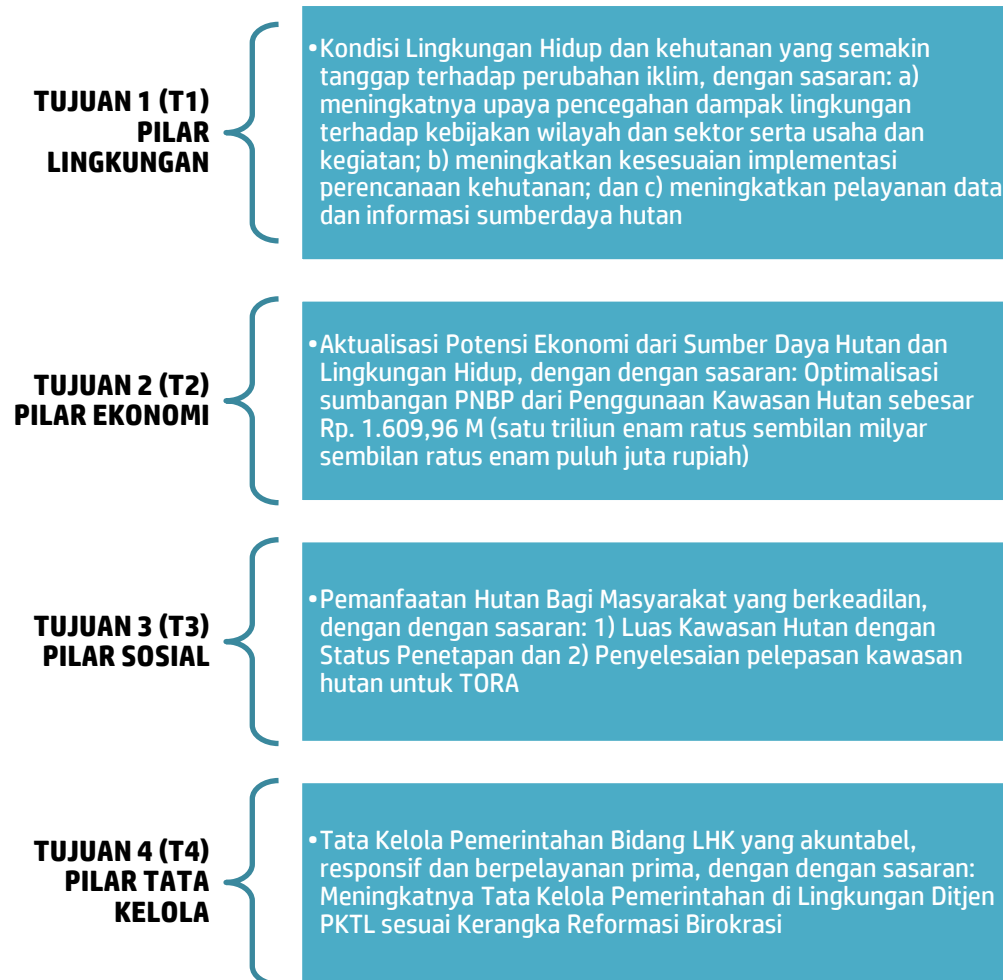
Pada tahun 2020 dan 2021, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan berbagai strategi dalam memberikan dukungan terhadap penanggulangan Pandemi Covid-19 (*Refocusing*), penyiapan lahan pangan terpadu *Food Estate* dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta penguatan kegiatan Perencanaan; Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan; Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan; Penataan dan Pencegahan dampak Lingkungan; Sarana dan Prasarana Pemantapan Kawasan Hutan; dan Kegiatan pendukung pemantapan kawasan hutan lainnya melalui penggunaan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Pada tahun 2022 ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terus berupaya bangkit dan beradaptasi menghadapi dampak pandemi tersebut melalui Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Tema pembangunan ini diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Dengan dukungan anggaran yang ada, beberapa langkah yang dilakukan pada tahun 2022 diantaranya percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan (reguler) dalam rangka penetapan kawasan hutan 100% sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Undang-undang Cipta Kerja, percepatan penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk Ibukota Negara (IKN), penguatan pengendalian lingkungan hidup, serta percepatan penyelesaian penyusunan rencana kawasan hutan dalam rangka Impementasi *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 di tingkat tapak.

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 yakni “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, serta tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tahun 2023 dengan narasi ringkas “Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia”, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya mengoptimalkan dan mempercepat penyelesaian kegiatan-kegiatan yang menjadi

prioritas, memperhatikan *mainstream* rencana pembangunan tahun 2023 tersebut dan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga berperan aktif dalam 4 (empat) pilar.



B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dipimpin oleh Direktur Jenderal.

PERMENLHK NOMOR 15 TAHUN 2021

TUGAS :

(Pasal 79)

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan

FUNGSI :

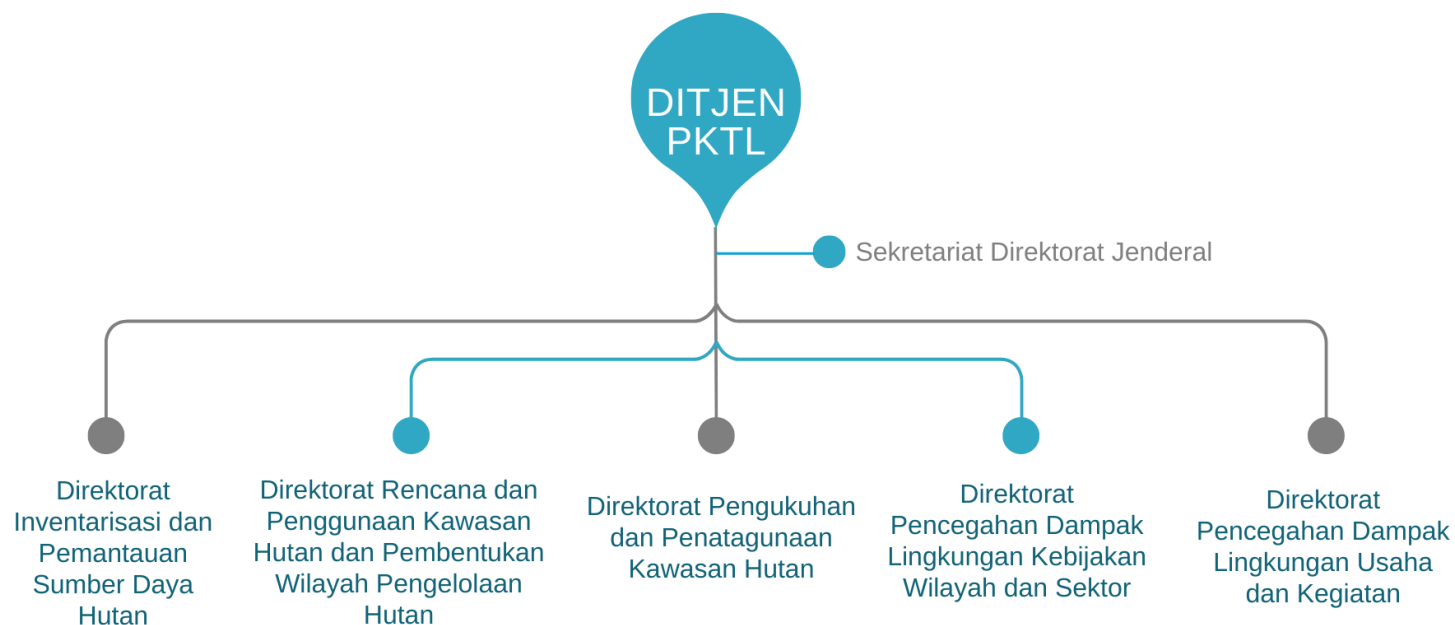
(Pasal 80)

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
7. Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, bahwa susunan organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri atas 6 (enam) Unit Kerja Eselon II, dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon II.

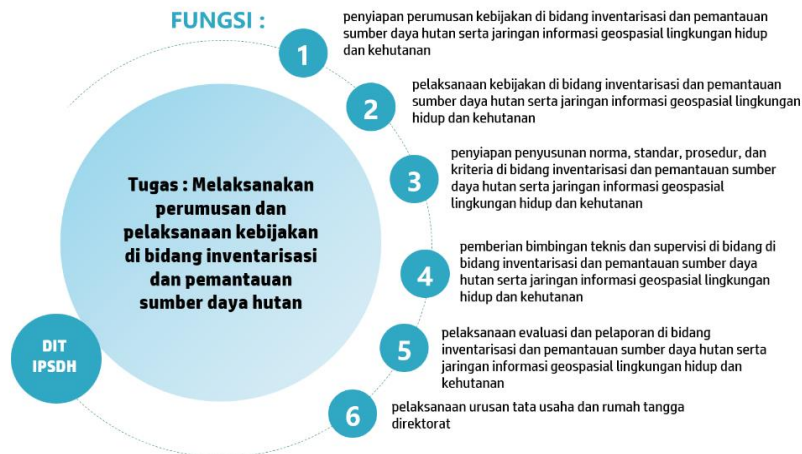
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN (Pasal 81, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



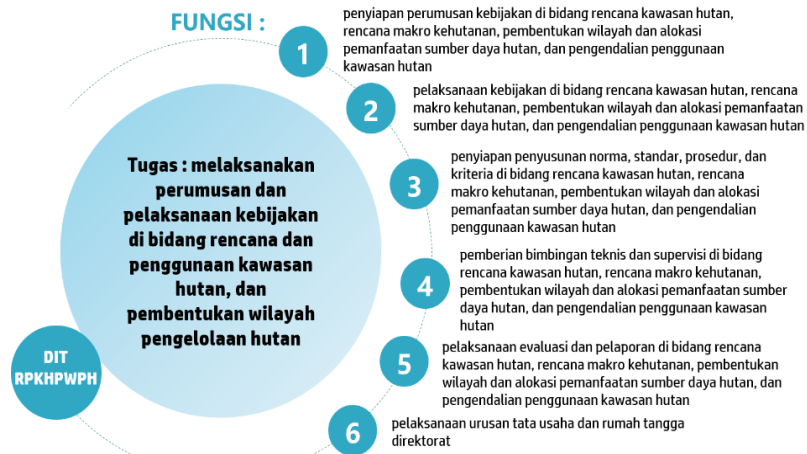
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
(Pasal 82 – 83, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
(Pasal 91 – 92, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



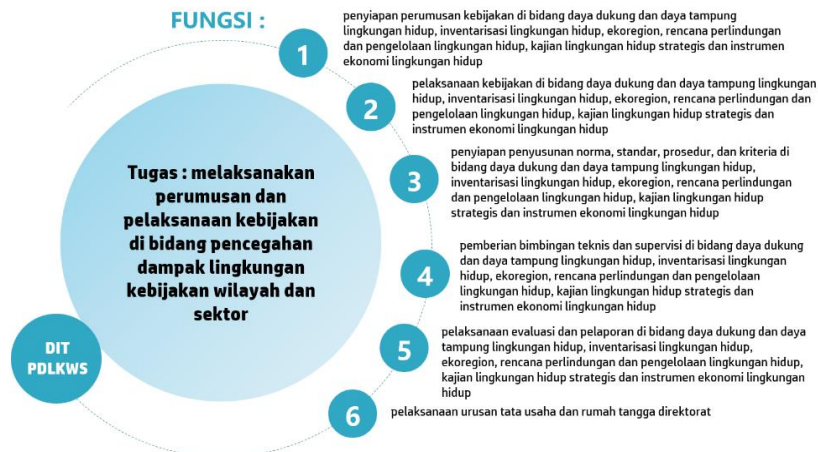
Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
(Pasal 99 – 100, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
(Pasal 107 – 108, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
(Pasal 115 – 116, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
(Pasal 123 – 124, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



Bahwa untuk mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata

kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan tata Lingkungan (BPKHTL) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta dipimpin oleh Kepala Balai.

PERMENLHK NOMOR 18 TAHUN 2022

TUGAS :	FUNGSI :
<p>Pasal 3, ayat (1)</p> <p>Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan</p>	<p>Pasal 3, ayat (2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan; 2. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan; 4. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu; 5. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; 6. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; 7. penyebaran informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; 8. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; 9. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 10. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 11. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; 12. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; 13. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrument ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan 14. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan yang selanjutnya disingkat BPKHTL adalah UPT yang menyelenggarakan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan, terdiri atas 22 (dua puluh dua) balai.

Tabel 1 Sebaran Nomenklatur, Lokasi dan Wilayah Kerja BPKHTL

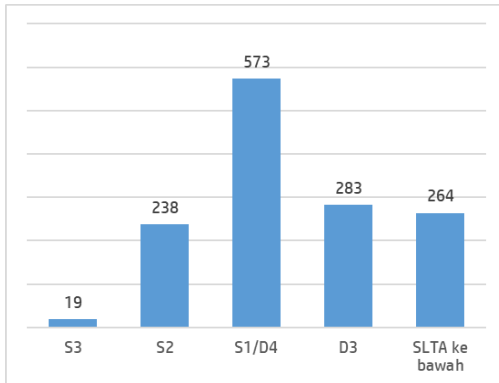
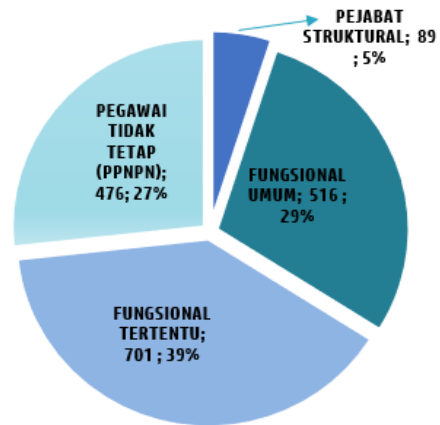
No	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	BPKHTL Wilayah I	Medan	(1) Provinsi Sumatera Utara dan (2) Provinsi Sumatera Barat.
2	BPKHTL Wilayah II	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan.
3	BPKHTL Wilayah III	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat.
4	BPKHTL Wilayah IV	Samarinda	(1) Provinsi Kalimantan Timur, dan (2) Provinsi Kalimantan Utara.
5	BPKHTL Wilayah V	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan.
6	BPKHTL Wilayah VI	Manado	(1) Provinsi Sulawesi Utara dan (2) Provinsi Maluku Utara.
7	BPKHTL Wilayah VII	Makassar	(1) Provinsi Sulawesi Selatan dan (2) Provinsi Sulawesi Barat.
8	BPKHTL Wilayah VIII	Denpasar	(1) Provinsi Bali dan (2) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9	BPKHTL Wilayah IX	Ambon	Provinsi Maluku.
10	BPKHTL Wilayah X	Jayapura	(1) Provinsi Papua, (2) Provinsi Papua Tengah, (3) Provinsi Papua Pegunungan, dan (4) Provinsi Papua Selatan.
11	BPKHTL Wilayah XI	Yogyakarta	(1) Provinsi Jawa Barat, (2) Provinsi Jawa Tengah, (3) Provinsi Jawa Timur, (4) Provinsi DI Yogyakarta, (5) Provinsi DKI Jakarta dan (6) Provinsi Banten.
12	BPKHTL Wilayah XII	Tanjung pinang	Provinsi Kepulauan Riau.
13	BPKHTL Wilayah XIII	Pangkal Pinang	(1) Provinsi Bangka Belitung dan (2) Provinsi Jambi.
14	BPKHTL Wilayah XIV	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15	BPKHTL Wilayah XV	Gorontalo	Provinsi Gorontalo.
16	BPKHTL Wilayah XVI	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah.
17	BPKHTL Wilayah XVII	Manokwari	Provinsi Papua Barat.
18	BPKHTL Wilayah XVIII	Banda Aceh	Provinsi Aceh.
19	BPKHTL Wilayah XIX	Pekanbaru	Provinsi Riau.
20	BPKHTL Wilayah XX	Bandar Lampung	(1) Provinsi Lampung dan (2) Provinsi Bengkulu.
21	BPKHTL Wilayah XXI	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah.
22	BPKHTL Wilayah XXII	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara.

(sesuai Permentlhk Nomor 18 tahun 2022)

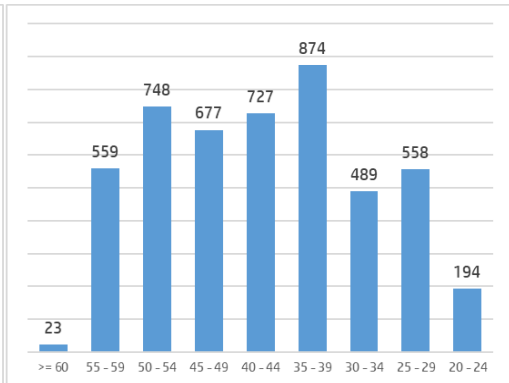
SUMBER DAYA MANUSIA

Pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentu saja tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2023, dengan target kinerja yang cukup besar, diantaranya penyelesaian tata batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100%, Optimalisasi penerimaan PNBP-PKH serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, maka perlu didukung sumber daya manusia sebagai pemikir, perencana maupun penggerak.

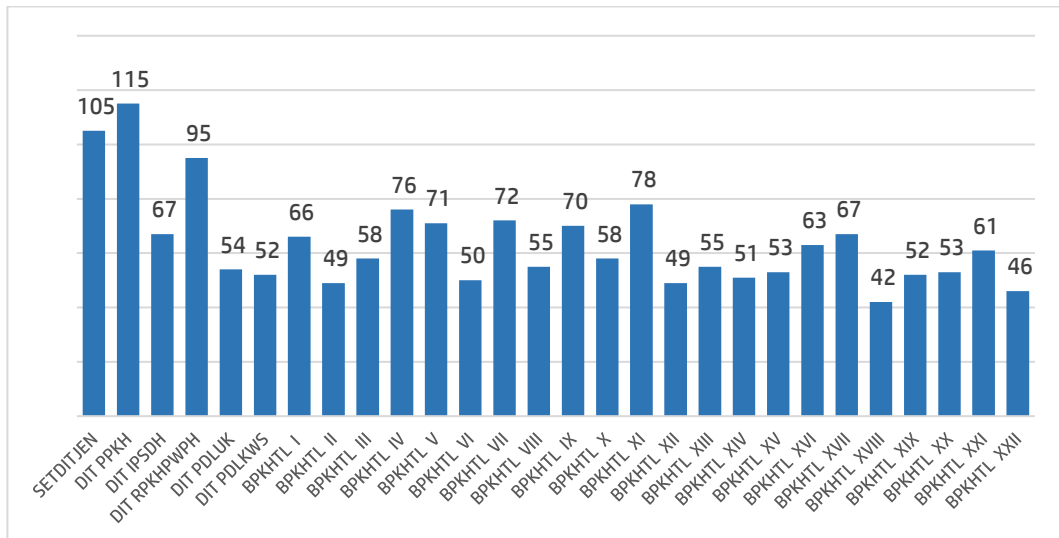
URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
PEJABAT STRUKTURAL	69	20	89
FUNGSIONAL UMUM	313	203	516
FUNGSIONAL TERTENTU	417	284	701
<i>Analisis Anggaran</i>	1	-	1
<i>Analisis Hukum</i>	3	2	5
<i>Analisis Kebijakan</i>	6	-	6
<i>Analisis Kepegawaian</i>	4	5	9
<i>Analisis Pengelolaan Keuangan APBN</i>	1	2	3
<i>Arsiparis</i>	6	13	19
<i>Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</i>	10	4	14
<i>Pengendali Dampak Lingkungan</i>	11	12	23
<i>Pengendali Ekosistem Hutan</i>	269	185	454
<i>Perancang Peraturan Perundang-undangan</i>	2	-	2
<i>Perencana</i>	17	24	41
<i>Pranata Humas</i>	1	1	2
<i>Pranata Keuangan APBN</i>	1	1	2
<i>Pranata Komputer</i>	20	7	27
<i>Surveyor Pemetaan</i>	65	28	93
PEGAWAI TIDAK TETAP (PPNPN)	349	127	476
TOTAL SDM (orang)	1.148	634	1.782



(BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)



(BERDASARKAN TINGKAT USIA)



Gambar 1 Sebaran SDM Lingkup Ditjen PKTL (orang) sd November 2022

Semakin meningkatnya target kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan khususnya Balai pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, perlu dilakukan pelatihan dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehutanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hingga November tahun 2022 telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 2 Kegiatan Pengembangan SDM Lingkup Ditjen PKTL (s.d November 2022)

JENIS PELATIHAN	PENYELENGGARA	JUMLAH PESERTA (ORANG)
Bimbingan Teknis Penilaian AMDAL	Setditjen PKTL	196
Diklat Fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli	BIG	11
Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis	Setditjen PKTL	97
Pelatihan Bahasa Inggris pada Tingkat Lanjutan	<i>Wall Street English</i>	1
Bimtek Penjelasan PAK Terintegrasi Surta	Setditjen PKTL	141
Diklat Fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Keterampilan	BIG	6
<i>In House Training</i> Desain Grafis dan Editing Video	PUSILKOM UI	22
Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan/ <i>Legislative Drafting Training (Intermediate Level)</i>	Jimly School of Law and Government (JSLG)	10
Pelatihan Penataan Batas Wilayah	BIG	36
Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL Tahun 2022	UNBRAW	30
Diklat Penilaian AMDAL Tahun 2022	UNBRAW /UGM	60
Pelatihan Advokasi Hukum	Jimly School of Law and Government (JSLG)	5
Pelatihan Sistem Informasi Geografis	BPUDL ITB	12
Pelatihan Budaya Pelayanan Prima	PT Tujuh Utama	50
Sosialisasi Perka BKN Nomor 11 Tahun 2022	Setditjen PKTL	168
Sosialisasi Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan PAK Terintegrasi	Setditjen PKTL	55
Bimbingan Teknis Karya Ilmiah "Menulis Karya Tulis Ilmiah Kilat dengan Metode Berpikiri Terbalik"	Setditjen PKTL	117
Bimbingan Teknis Kenaikan Pangkat Secara Digital Menggunakan Aplikasi SIASN	Setditjen PKTL	100

D. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024 terdapat 6 (enam) pengarusutamaan yang saling terkait dan saling mendukung.



Gambar 2 Dukungan Ditjen PKTL dalam Pengarusutamaan (*mainstreaming*)

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

Tahun 2021 menjadi tahun untuk Indonesia beradaptasi dan menangani pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga. Namun demikian dengan tantangan yang dihadapi saat ini, tidak saja penanganan pandemi dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan. Dalam hal ini, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

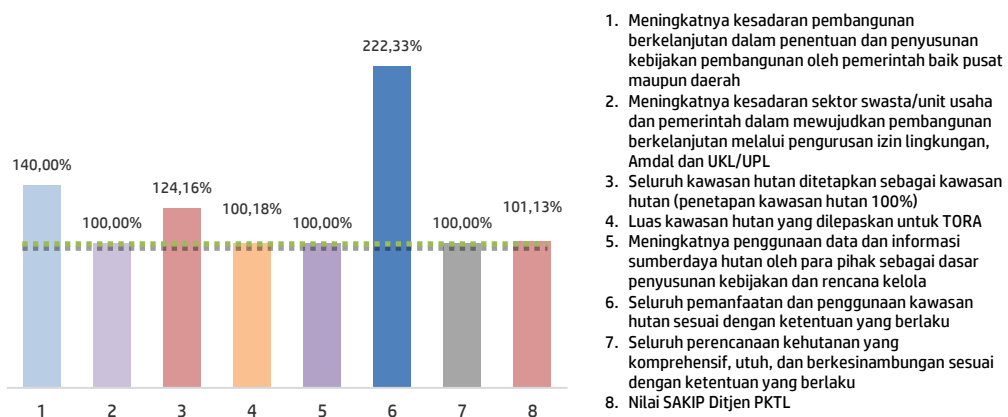
Pada tahun 2021 berjalan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2021 yang tentunya mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2021, yakni:

a. Refocusing dan realokasi belanja tahap I	Revisi ini merupakan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2021 dalam rangka penanggulangan Covid-19. Revisi dilakukan dengan menyesuaikan pagu belanja K/L yang dilakukan pada anggaran yang berasal dari rupiah murni dalam satu program dan pencairan blokir/tanda bintang. Dalam revisi ini terjadi pengurangan volume RO kegiatan non-prioritas nasional. Perubahan besar terdapat pada pengurangan anggaran pada kegiatan penataan batas Kawasan hutan (regular) dan inventarisasi hutan nasional.
b. Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan	Revisi ini dilakukan dalam rangka penambahan pagu anggaran DIPA yang bersumber dari PNBP-PKH dan penambahan volume RO Prioritas Nasional didalam satu Program. Penambahan anggaran yang bersumber dari PNBP-PKH sebagian besar digunakan untuk kegiatan penguatan kawasan hutan khususnya kegiatan percepatan penetapan kawasan hutan (10.221 km) dan penyelesaian TORA (tata batas tora 3.792 km / inver tora seluas 20,190 Ha), pemulihan kegiatan Inventarisasi SDH, optimalisasi penerimaan PNBP-PKH (202 WB), pengembangan <i>Enterprise Architecture</i> (EA) Integrasi Sistem Informasi lingkup Ditjen PKTL serta dukungan terhadap pencegahan dampak lingkungan.
c. Penyesuaian RO-KRO DIPA untuk Penandaan Rincian Output PC PEN Kementerian LHK TA. 2021	Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 pasal 8 bahwa disepakati adanya pemisahan antara alokasi anggaran PEN dan alokasi anggaran non-PEN dengan membuat Rincian Output PEN yang baru, maka dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan dengan adanya penambahan Rincian Output baru untuk menampung

	<p>penandaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jenis pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka pergeseran anggaran antara RO Reguler ke RO khusus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain pergeseran anggaran dalam rangka ketahanan pangan dan pergeseran anggaran dalam rangka padat karya.</p>
<p>d. Refocusing dan realokasi belanja tahap II</p>	<p>Revisi ini merupakan penghematan Belanja Pegawai Tahun 2021, serta penyesuaian anggaran dan lokasi kegiatan <i>Food Estate</i> Tahun 2021. Penghematan belanja pegawai dilakukan dengan pengurangan pagu anggaran belanja pegawai (tunjangan kinerja THR dan Gaji-13) yang bersumber dari Rupiah Murni. Penyesuaian anggaran dan lokasi kegiatan <i>Food Estate</i> Tahun 2021 dilakukan dengan penyesuaian lokus prioritas kegiatan <i>Food Estate</i> Tahun 2021, Revisi Pengalokasian anggaran <i>Refund Ineligible Expenditure</i> HLN TA 2019</p>
<p>e. Refocusing dan realokasi belanja tahap III</p>	<p>Pada tahap ini, <i>refocusing</i> dan realokasi belanja dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya sumber dana <i>refocusing</i> berasal dari Rupiah Murni dengan jenis belanja yang data dipergunakan adalah belanja barang dan belanja modal (belanja Non operasional). Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni pengurangan anggaran kegiatan PEN, pergeseran anggaran antar Rincian Output dalam satu Program.</p>
<p>f. Refocusing dan realokasi belanja tahap IV</p>	<p>Revisi ini merupakan revisi dalam rangka penghematan pagu belanja yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dalam rangka penanganan covid diantaranya penghematan Belanja Pegawai Tahun 2021, pengurangan pagu anggaran yang bersumber dari RM pada berbagai kegiatan serta pergeseran anggaran antar program dari sumber dana PNBK.</p>
<p>g. Penyesuaian anggaran kegiatan dalam 1 (satu) program dalam rangka percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan</p>	<p>Revisi ini merupakan revisi pergeseran anggaran belanja antar satker pada kegiatan pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan dalam rangka percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Beberapa kegiatan diantaranya pembahasan trayek batas, inventarisasi kawasan, penataan batas kawasan hutan dan penataan batas kawasan perairan.</p>

Tabel 3 Capaian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2021

SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
IKP : Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	15	21	140,00%
IKP : Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	Laporan	3	3	100,00%
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual				
IKP : Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta hektar	12	14,90	124,16%
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				
IKP : Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	184,4	184,731	100,18%
Tersedianya Data dan Informasi SDH				
IKP : Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Layanan	1	1	100,00%
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan				
IKP : Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	667	222,33%
Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan				
IKP : Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	12	12	100,00%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi				
IKP : Nilai SAKIP Ditjen PKTL	poim	80	79,89	101,13%
RATA-RATA				123,48%



Gambar 3 Capaian Kinerja Ditjen PKTL tahun 2021
Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2021

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah disusun arsitektur kinerja dalam rencana kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 berdasarkan perubahan struktur organisasi, tugas pokok maupun fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Arsitektur kinerja tersebut juga telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Pada tahun 2022 berjalan, telah dilakukan beberapa penyesuaian target kinerja yang diakibatkan oleh penyesuaian anggaran pada kegiatan prioritas, pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) pada Belanja K/L TA. 2022, maupun penambahan anggaran yang berasal dari sumber dana PNBK-PKH, antara lain:

a. Dukungan penyelesaian RPPLH Nasional	Revisi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional berupa pembahasan materi teknis lintas kementerian/lembaga, legal drafting dan finalisasi draft RPP. Percepatan penyusunan RPP ini sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 serta memenuhi mandat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengakomodir dinamika perencanaan pembangunan nasional bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), komitmen Indonesia terkait penurunan emisi gas rumah kaca sesuai <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC), dan isu strategis lainnya. Pemenuhan kebutuhan anggaran dilakukan melalui pergeseran anggaran antar RO antar satker pada 1 (satu) program yang sama.
b. Penambahan Pencadangan Anggaran (<i>Automatic Adjustment</i>) Belanja Ditjen PKTL TA. 2022	Guna mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, dilakukan penambahan pencadangan anggaran (<i>Automatic Adjustment</i>) pada semua K/L. Telah ditetapkan tambahan <i>Automatic Adjustment</i> (AA) belanja pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang berasal dari Belanja Operasional dan Non Operasional.
c. Pemenuhan kebutuhan Dana Operasional Pimpinan (DOWM) melalui pergeseran anggaran belanja Program Dukman antar unit eselon I	Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Kementerian LHK mengajukan usulan pergeseran belanja dalam Program Dukungan Manajemen Teknis melalui optimalisasi anggaran internal Setjen KLHK dan melalui pergeseran anggaran antar unit eselon I lingkup Kementerian LHK.

<p>d. Realokasi anggaran PNBP-PKH</p>	<p>Berdasarkan hasil pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian LHK, telah disepakati bersama target pendapatan dan pagu penggunaan untuk masing masing jenis PNBP yang berlaku lingkup Kementerian LHK. Untuk jenis PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), telah ditetapkan target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1,399 triliun dan pagu penggunaan PNBP-nya sebesar Rp150 miliar.</p> <p>Dari pagu penggunaan PNBP sebesar Rp150 miliar di atas, yang telah teralokasi dalam DIPA Ditjen PKTL tahun 2022 adalah sebesar Rp85,408 miliar. Terjadi misalokasi/selisih pagu penggunaan PNBP PKH sebesar Rp64,592 miliar pada unit eselon I lain di luar Ditjen PKTL sehingga untuk sementara dilakukan blokir PNBP sebesar angka di atas pada Ditjen PDASRH selaku unit eselon I pengguna PNBP terbesar. Hal tersebut mengakibatkan perlu adanya realokasi pagu PNBP PKH dari Ditjen PDASRH ke Ditjen PKTL untuk memenuhi pagu penggunaan PNBP PKH sebesar Rp150 miliar.</p> <p>Anggaran PNBP PKH tersebut dimanfaatkan tentunya untuk percepatan penetapan kawasan hutan (penambahan penetapan kawasan hutan, penyelesaian penataan batas Kawasan IKN dalam rangka penyiapan pelepasan IKN, serta penyusunan perencanaan kawasan hutan mendukung kebijakan pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan.</p>
<p>e. Dukungan Pelaksanaan <i>Environments Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group</i> (EDM-CSWG)</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberi mandat sebagai penyelenggara kegiatan <i>Environments Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group</i> (EDM-CSWG), dimana pendanaan penyelenggaraan dibebankan pada APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
<p>f. penyesuaian anggaran yang berstatus blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA) Tahun 2022</p>	<p>Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun 2022, seluruh anggaran yang masih terblokir (<i>Automatic Adjustment</i>) direalokasi ke bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).</p>

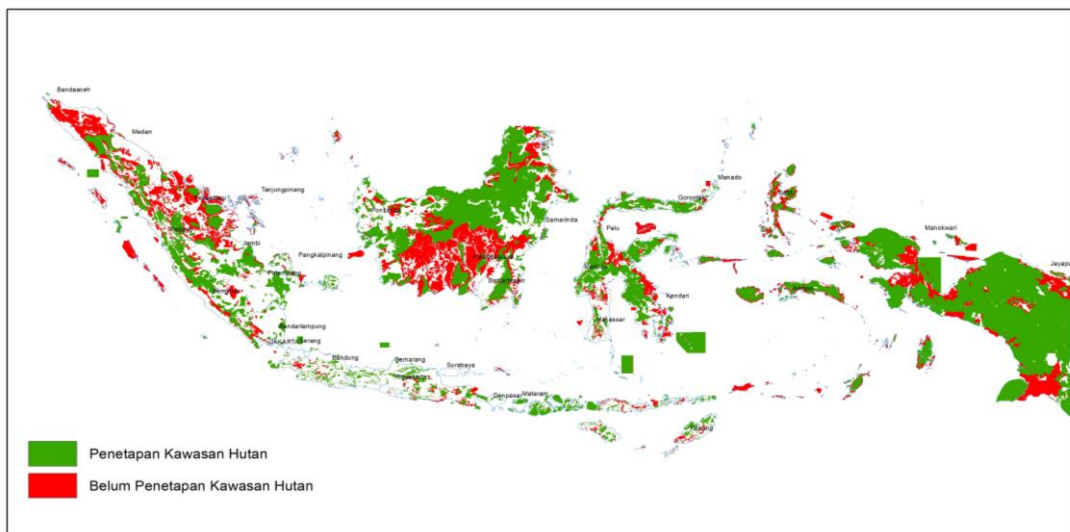
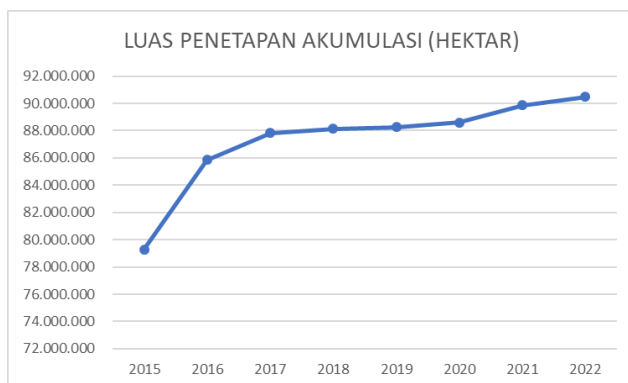
Tabel 4 Prognosis Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2022

SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENYESUAIAN
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan			
IKP : Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	1	1
IKP : Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	Laporan	1	1
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual			
IKP : Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta hektar	2,5	5,9
IKP : Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	30	31
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA			
IKP : Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	94,756	94,756
Tersedianya Data dan Informasi SDH			
IKP : Meningkatnya penggunaan data dan informasi SDH oleh para pihak	Layanan	1	1
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan			
IKP : Seluruh Penggunaan KH sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300
Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan			
IKP : Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	1	1
Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima			
IKP : Nilai SAKIP Ditjen PKTL	poin	81	81

IKP 1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan. Secara kumulatif, sampai dengan November 2022, telah ditetapkan kawasan hutan sebanyak 2.199 unit kelompok hutan dengan total luas 90.845.838 ha atau 72,22% dari total luas Kawasan hutan (125.795.306 ha).

S/D TAHUN	LUAS PENETAPAN AKUMULASI (HEKTAR)
2015	79.287.632
2016	85.838.601
2017	87.833.320
2018	88.145.055
2019	88.248.478
2020	88.585.951
2021	89.863.031
2022	90.845.838



Gambar 4 Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan (s.d. November 2022)

Target awal penetapan kawasan hutan di tahun 2021 adalah 3,5 juta hektar, namun dengan adanya penambahan anggaran penataan batas kawasan hutan, terjadi perubahan target menjadi 12 juta hektar. Penambahan target luas penetapan kawasan hutan terjadi pada pertengahan tahun anggaran disebabkan oleh adanya penambahan anggaran pelaksanaan penataan batas. Penambahan penataan batas ini tidak serta merta langsung menghasilkan luas penetapan kawasan hutan pada tahun anggaran yang sama. Secara umum, pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh Balai

Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan baru dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran untuk kemudian dilakukan penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Penelaahan ini baru dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pada tahun 2022, berdasarkan target awal penetapan kawasan hutan sebesar 2,5 juta hektar. Dengan adanya penambahan anggaran yang berdasarkan dari sumber dana PNBK-PKH, maka terdapat penambahan target menjadi 5,9 juta hektar, dengan target penyelesaian penataan batas Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan serta Sulawesi Tengah. Adapun sisa penetapan kawasan hutan ini akan diselesaikan pada tahun 2023 sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

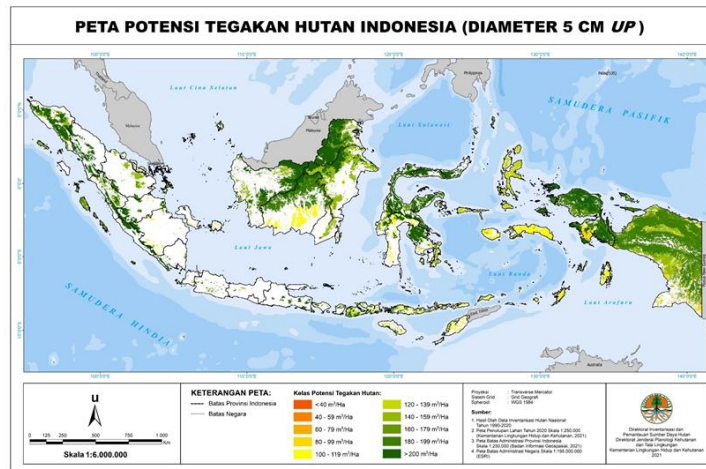


IKP 2. Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola

Peningkatan penggunaan data dan informasi sumber daya hutan dicapai melalui kegiatan-kegiatan mencakup Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan, Update Penutupan Lahan Nasional; Laporan Deforestasi; Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dan pelayanan penggunaan data dan informasi SDH melalui analisis spasial telaah berbagai kebijakan dan program pemerintah, kebencanaan serta telaah kepentingan negara lainnya.

Data dan informasi sumberdaya hutan merupakan dasar yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan rencana kelola. Data dan informasi sumberdaya hutan yang akurat merupakan sasaran dalam penyelenggaraan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan. Pengumpulan data dan informasi sumberdaya hutan dilakukan dengan dua metode utama, yaitu inventarisasi hutan terestris dan penerapan teknologi penginderaan jauh. Hasil dari inventarisasi hutan tersebut akan menjadi data potensi tegakan hutan Indonesia. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

PETA POTENSI TEGAKAN HUTAN INDONESIA (Volume Tegakan Diameter 5cm Ke Atas)



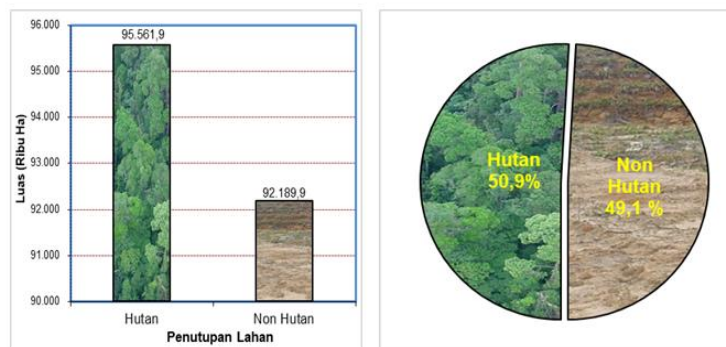
Sumber: Hasil Inventarisasi Hutan Nasional (1990-2021)

Gambar 5 Data Potensi Tegakan Hutan Indonesia (sd 2021)

Data penutupan lahan merupakan salah satu informasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan hutan secara berkelanjutan khususnya dalam bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Penyediaan data penutupan lahan dilakukan dalam dua skala yaitu penutupan lahan skala nasional dan penutupan lahan skala unit pengelolaan (tingkat tapak). Data dan informasi penutupan lahan terkini di daratan Indonesia baik luas maupun sebarannya dikemas dalam laporan rekalkulasi penutupan lahan Indonesia. Rekalkulasi penutupan lahan Indonesia dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,8 juta ha yang terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 120,3 juta ha atau 64,1% dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 67,5 juta ha atau 35,9%. Berdasarkan hasil rekalkulasi penutupan lahan Indonesia secara keseluruhan terhadap luas daratan Indonesia pada tahun 2020, terdapat lahan berhutan seluas 95,6 juta ha (50,9 %) dan lahan tidak berhutan seluas 92,2 juta ha (49,1%). Berdasarkan hasil rekalkulasi penutupan lahan Indonesia secara keseluruhan terhadap luas daratan Indonesia pada tahun 2019, terdapat lahan berhutan seluas 94,1 juta ha (50,1%) dan lahan tidak berhutan seluas 93,6 juta ha (49,9%). Angka ini menunjukkan adanya penambahan luas dan persentase lahan berhutan di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

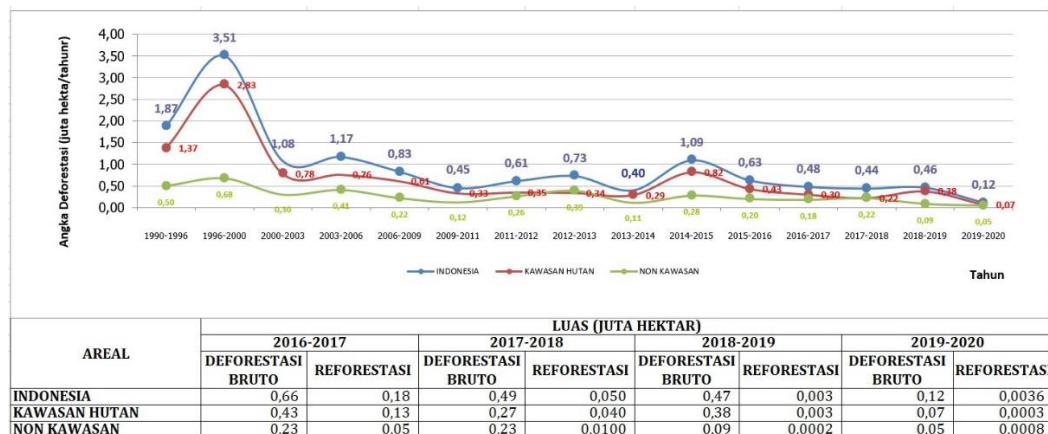
HASIL REKALKULASI PENUTUPAN LAHAN INDONESIA TAHUN 2020

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INDONESIA											
A.	Hutan	17.485,9	24.162,4	21.753,2	18.590,5	81.991,9	6.421,3	88.413,2	7.148,7	95.561,9	50,9
	- Hutan Primer	12.556,5	16.095,8	9.761,1	4.571,6	42.984,9	2.532,0	45.517,0	1.479,3	46.996,3	25,0
	- Hutan Sekunder	4.815,1	7.788,9	11.581,5	10.063,4	34.248,8	3.849,3	38.098,1	5.017,8	43.115,9	23,0
	- Hutan Tanaman *	114,3	277,8	410,6	3.955,5	4.758,2	39,9	4.798,1	651,6	5.449,7	2,9
B.	Non Hutan	4.386,4	5.397,7	5.049,6	10.641,8	25.475,5	6.372,9	31.848,4	60.341,5	92.189,9	49,1
	Total	21.872,2	29.560,2	26.802,8	29.232,3	107.467,5	12.794,2	120.261,6	67.490,2	187.751,9	100,0



Gambar 6 Hasil Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia tahun 2020

Dari analisis perubahan penutupan lahan dapat dilakukan penghitungan deforestasi. Pada tahun 2021 dilakukan penghitungan deforestasi tahun 2019-2020 sedangkan pada tahun 2022 sedang dalam proses penghitungan deforestasi tahun 2020-2021. Berikut perkembangan angka deforestasi tahun 1990 hingga 2020.



Gambar 7 Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990-2020

Indonesia berhasil menurunkan deforestasi 75,03% pada periode tahun 2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu Ha. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 462,46 ha. Penurunan angka deforestasi ini,

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KLHK memberikan hasil yang signifikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden tersebut telah disusun Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang diperbaharui setiap 6 bulan. Pada Tahun 2022 diterbitkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode I sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 dan diperbaharui dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode II sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022.

Berkenaan dengan terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebagai salah satu entitas Eselon II Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditunjuk sebagai Walidata Geospasial, telah dilakukan pengembangan infrastruktur Informasi Geospasial yaitu:

- a. Penataan kebijakan dan peraturan melalui penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyusunan Peta Jalan Pengembangan Informasi Geospasial Lingkup KLHK Tahun 2022 - 2026.
- b. Penguatan Kelembagaan Pelaksana JIG melalui pembentukan Tim pelaksana JIG lingkup KLHK (Keputusan Sekjen KLHK Nomor SK.12/SETJEN/ROKUM/PLA.1/3/2022), pemberntuan Tim Pengelola JIG Lingkup BPKH (Keputusan Direktur IPSDH Nomor SK.13/IPSDH/JIGLHK/PLA.1/6/2022). dan forum Data Geospasial yang dikoordinasikan oleh Walidata Geospasial dalam bentuk diskusi, rapat dan grup media sosial.
- c. Penyempurnaan dan peningkatan standar data melalui pemutakhiran Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kualitas DG dan IGT lingkup KLHK, draf manajemen kualitas (form QC dan QA), draf standar rule topologi, draf simbologi peta, dan draf klasifikasi hak akses bagi pakai IGT, serta penjaminan kualitas terhadap pemutakhiran 31 IGT yang diproduksi oleh Produsen DG selama tahun 2022 sebelum IGT tersebut disebarluaskan.
- d. Peningkatan teknologi melalui pengembangan Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, diantaranya menu tata kelola, tampilan desain portal SIGAP, penambahan fitur analisis data geospasial berbasis web yang akan memudahkan pengguna menganalisis secara interaktif dengan menggunakan batas administrasi pemerintahan dan batas *Area of Interest* (Aoi), pencarian metadata, dan kamus data selama tahun 2021-2022, serta peningkatan infrastruktur JIG yaitu

pengadaan server dan laptop. KLHK cq. Direktorat IPSDH mendapatkan penghargaan Bhumandala Award Tahun 2022 sebagai simpul jaringan terbaik tingkat K/L (Bhumandala Kanaka/ Emas).

Selain itu juga telah dilakukan pengumpulan dan penyimpanan 90 IGT lingkup KLHK yang berasal dari 34 Produsen Data Geospasial, serta penyebarluasan IGT melalui pelayanan permohonan pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 523 Permohonan (K/L, Pemda, Perguruan Tinggi, perseorangan, masyarakat), dan melalui portal SIGAP KLHK. Dalam rangka optimalisasi pertukaran IGT, maka telah dilakukan penyusunan dan penandatanganan perjanjian keamanan data dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur, serta BRGM dalam rangka bagi pakai IGT melalui SIGAP KLHK. Jumlah IGT dari 3 perjanjian kerjasama dimaksud meliputi 31 IGT LHK, antara lain data penutupan lahan, KPH, KPHK dan kawasan konservasi, deforestasi dan reforestasi, IGT terkait perubahan iklim, seperti kebakaran hutan dan lahan, WPK, lokasi Proklamasi, kerusakan lahan, serta terkait gambut dan perhutanan sosial, dan lainnya. Proses persiapan kerjasama keamanan data dalam rangka pertukaran IGT KLHK ini didukung oleh anggaran yang berasal dari luar DIPA dengan tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Pasca terbitnya Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang telah disempurnakan dengan Perpres No. 23 Tahun 2021, Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial dan koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup KLHK, telah memfasilitasi kegiatan kompilasi dan integrasi sebanyak 25 IGT sesuai renaksi percepatan pelaksanaan KSP ke portal KSP yang berkoordinasi dengan Kemenko bidang Perekonomian dan BIG. Pasca terbitnya PP 43 / 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihinggaan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, Dit IPSDH juga memfasilitasi penyusunan PITT yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator bidang perekonomian, yaitu:

1. Kepmenko Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksihinggaan Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan;
2. Kepmenko Perekonomian Nomor 222-255 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksihinggaan Batas Daerah, Tata Ruang Kawasan Hutan;
3. Kepmenko Perekonomian Nomor 133 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik Hak Guna Usaha dan Tutupan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan;
4. Kepmenko Perekonomian Nomor 134 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksihinggaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu dalam rangka pemenuhan renaksi STRANAS PK peran Direktorat IPSDH adalah melakukan kompilasi dan integrasi IGT dalam One Map untuk mendukung proses telaahan di direktorat teknis terkait. Capaian dalam rangka stranas PK adalah diterbitkannya penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Bidang LHK dengan RTRWP/K dan tematiknya lainnya sebagai informasi awal penyelesaian permasalahan di lapangan sesuai mekanisme peraturan perundangan yang berlaku tanpa menghilangkan sanksi administrasi dan pidananya.

IKP 3. Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan proses perizinan dapat terlayani secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan. Selain itu, kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan dapat terakomodir khususnya untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air dengan tetap menjamin keberlanjutan fungsi hutan.

Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai terdiri dari:

- Izin pinjam pakai kawasan hutan (Eksplorasi/Operasi Produksi Pertambangan, dan Non Pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Survei
- Penetapan areal kerja Ijin Pinjam Pakai
- Serah Terima Lahan Kompensasi
- Persetujuan Kerjasama penggunaan kawasan hutan
- Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
- Pengakhiran IPPKH.

Total Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterima di Tahun 2021 sebanyak 521 unit yang terdiri dari permohonan Operasi Produksi, Eksplorasi Lanjutan, Persetujuan Survey, Persetujuan Kerjasama, dan Lahan Kompensasi dan Perpanjangan Penyelesaian Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Jumlah pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 667 pemohon terlayani 100%. Demikian juga pada tahun 2022, berdasarkan target renja tahun 2022, pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan berpotensi melebihi dari target yang seharusnya yakni 300 pemohon.

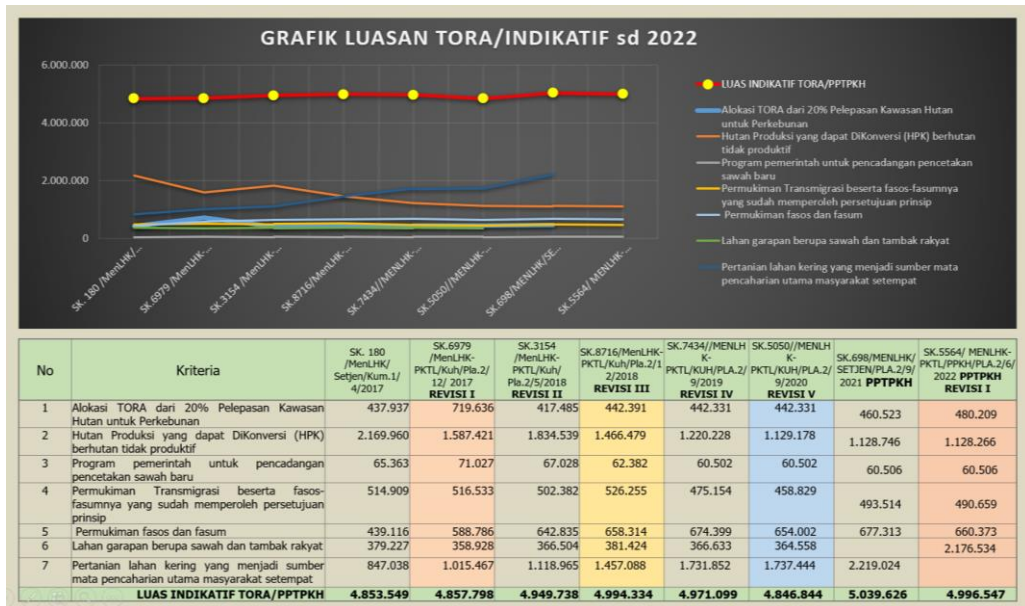
Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Online.

Tabel 5 Target dan Realisasi Penerimaan PNBP-PKH tahun 2009 s.d. tahun 2022

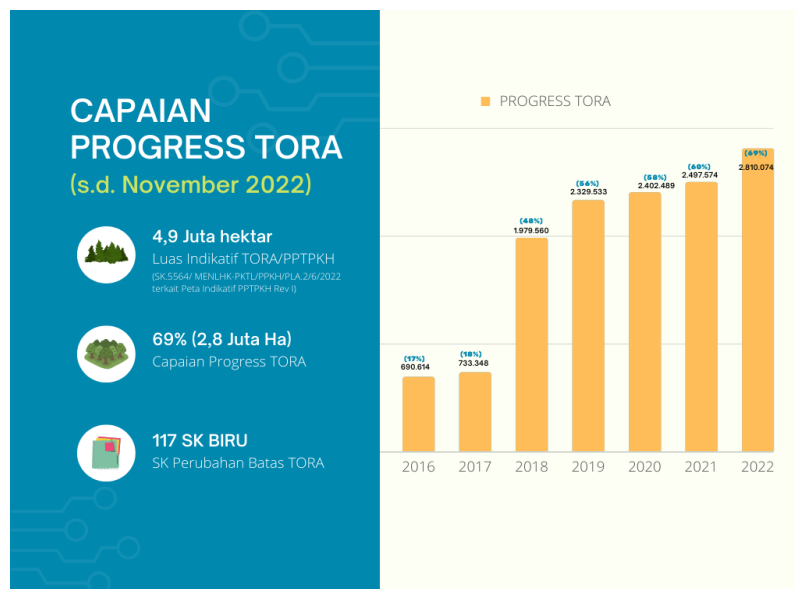
NO	TAHUN	Jumlah WB	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Ket
1	2009	130	196.013.110.000	169.797.334.864	86,63%	
2	2010	182	100.000.000.000	175.859.245.949	175,86%	
3	2011	251	175.018.696.000	432.550.625.157	247,15%	
4	2012	339	227.293.588.000	472.956.976.846	208,08%	
5	2013	449	495.168.490.000	587.960.710.378	118,74%	
6	2014	548	640.322.000.000	882.598.385.150	137,84%	
7	2015	593	849.588.380.000	1.070.087.169.829	125,95%	
8	2016	641	1.000.307.416.075	1.183.084.469.880	118,27%	
9	2017	785	1.164.846.575.540	1.413.168.383.981	121,32%	
10	2018	844	1.181.072.838.280	1.535.241.339.864	129,99%	
11	2019	913	1.164.514.574.450	2.121.568.893.935	182,18%	
12	2020	581	1.474.200.000.800	1.926.011.409.769	130,65%	
13	2021	578	1.445.000.000.000	2.474.382.466.657	171,24%	
14	2022	530	1.770.700.460.000	2.213.115.123.189	124,98%	Realisasi sampai Oktober 2022
Total			11.884.046.129.145	16.658.382.535.448	140,17%	

IKP 4. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Sumber-sumber TORA tergambar dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA, dan dilakukan revisi setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan (1) data dan informasi penutupan lahan terkini; (2) hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan; dan (3) masukan dari para pihak.



Gambar 8 Revisi Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber TORA



Hingga November 2022, progress pencapaian TORA telah mencapai 2,8 juta Hektar atau 69% dari target capaian TORA hingga tahun 2024, dengan menghasilkan jumlah SK Perubahan Batas TORA sebanyak 117 SK Biru. Penerbitan SK pelepasan kawasan hutan ini merupakan tahap akhir dari proses penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA baik dengan mekanisme inver, maupun non-inver. Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) sedikitnya permohonan pelepasan HPK tidak produktif yang sudah dicadangkan; 2) Terdapat Kab/Kota yang tidak mengusulkan/terlambat mengajukan permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH); 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan PPTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Keterbatasan anggaran APBN untuk kegiatan inver maupun tata batas; 5) Lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA.



IKP 5. Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara umum, rencana kehutanan terdiri dari Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan. Dalam proses mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2021 dan 2022 berjalan telah dilakukan beberapa pencapaian output, diantaranya:

a. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP;

Perkembangan luas kawasan hutan sangat dinamis. Hal ini disebabkan antara lain karena perubahan fungsi kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, kegiatan penataan batas kawasan hutan dan perubahan RTRW Provinsi. Perkembangan kawasan ini secara langsung mengakibatkan perubahan terhadap wilayah pengelolaan KPHL dan KPHP. Sehingga perlu dilakukan rasionalisasi wilayah KPH secara berkala terhadap perkembangan kawasan hutan. Rasionalisasi setidaknya dapat berpengaruh terhadap luas KPH secara keseluruhan dan jenis atau dominasi fungsi kawasan hutan di KPH itu sendiri. Selain itu, perubahan wilayah KPH dimungkinkan melalui usulan pemerintah daerah. Pada Tahun 2021 telah dilakukan penyusunan/update peta penetapan dan kelembagaan KPH di provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Maluku Utara, sedangkan 3 (tiga) provinsi sampai dengan akhir tahun 2021 masih berproses dalam penetapan SK Menteri LHK. Update peta wilayah KPH Indonesia tetap dilakukan dan telah diupload ke jaringan data spasial kehutanan.

b. Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang Telah Mengakomodir RKTN;

Rencana Pembangunan Kehutanan adalah rencana kehutanan dalam jangka waktu dan skala geografis tertentu, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan wilayah dengan memperhatikan arahan spasial rencana kawasan hutan dan dalam penyusunannya mengikuti siklus perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Kehutanan terdiri dari Rencana Strategis Kementerian, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Provinsi, Rencana Strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renstra KPH), Rencana Kerja Kementerian, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Provinsi, dan Rencana Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renja KPH).

Sebagai bagian integral dari pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan hutan memiliki keunikan dalam pengaturan aktivitas yang diperkenankan

diatasnya. Untuk mewujudkan kesamaan ruang antara peta kawasan hutan dengan peta pola ruang RTRWP, perlu dilakukan pengendalian penataan ruang, yang menghasilkan peta hasil integrasi KPH dalam RTRWP dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam kegiatan fasilitasi penataan ruang Kawasan hutan pada saat dilakukan review RTRWP.

Untuk menjawab dinamika multisektoral diperlukan suatu kajian yang komperhensif dan salah satu yang utama adalah adanya mekanisme pengintegrasian (analisis kesesuaian) Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, berupa Pengendalian penataan ruang kawasan hutan, Data dan informasi Rencana Tata Ruang termutakhir, dan Peta integrasi (analisis kesesuaian) Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan.

Kegiatan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan dalam review RTRWP dalam upaya menyiapkan alokasi ruang kawasan hutan berdasarkan penelitian terpadu. Pada tahun 2021, Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP ini telah disusun pada 3 provinsi, yaitu RTRWP Provinsi Bengkulu, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Sebagai upaya mewujudkan keselarasan antara Rencana Kehutanan pusat dan daerah, pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan yang meliputi 5 sub kegiatan; yaitu:

1. Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN, yang dilaksanakan pada 8 (delapan) propinsi yaitu: Banten, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung dan Jawa Tengah;
2. Fasilitasi Penyusunan/Review RKTP, yang dilaksanakan terhadap 11 provinsi, yaitu Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Aceh, Sulawesi Tenggara, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Bali, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan;
3. Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat, berupa Kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat dilakukan dengan cara memantau keselarasan antara kebijakan dan strategi pada Rencana Kehutanan tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 Revisi I;
4. Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi, dilanjutkan dengan melakukan pemantauan secara *desk analysis* pada 4 (empat) provinsi yang telah memiliki RKTP dan sudah disahkan melalui Perda provinsi, namun belum dipantau secara *desk analysis* pada tahun 2020 yaitu provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat;
5. Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Tingkat Tapak, dilakukan pada 7 provinsi terpilih yaitu: Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Banten.

c. Data Areal Perhutanan Sosial

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi pemanfaatan kawasan hutan yang akan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta hektar. Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan identifikasi terhadap pemanfaatan hutan dalam hal ini telah menetapkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas ± 14 juta hektar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8878/MENLHK/PKTL/ REN/PLA.0/12/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VII).

Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, pemberian hak akses masyarakat perhutanan sosial yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum atas akses kelola dan pemanfaatan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Selain itu, sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial Kawasan hutan. Pemberian hak akses masyarakat dengan perhutanan sosial dengan tahap awal pada tahun 2016 yaitu menetapkannya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sebagaimana disebut di atas tersebar di seluruh Indonesia kecuali Pulau Jawa, yang terdiri dari areal perhutanan sosial yang berada di hutan produksi dan hutan lindung, perhutanan sosial yang berada di lahan gambut dan potensi areal perhutanan sosial yang berada di wilayah 20 persen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Kenyataannya saat ini, konsentrasi kemiskinan di Jawa membuat penduduk pulau terpadat Indonesia ini sudah mendesak mendapatkan lahan. Tetapi, konsep reforma agraria mustahil diimplementasikan di Jawa mengingat luas kawasan hutan tidak lagi memungkinkan untuk dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Karena kawasan hutan Pulau Jawa kurang dari 30 persen, berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka hutan di Jawa tidak bisa dilepas. Perbaikan kebijakan pengelolaan kawasan hutan di Jawa tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan pasal 125 ayat (7), yang menyatakan bahwa kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dilimpahkan penyelenggaraan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Adapun peruntukannya yaitu untuk kepentingan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan (Konflik tenurial, konflik misal pemukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, lahan pengganti, hutan cadangan, hutan pangonan, proses TMKH), penggunaan kawasan hutan (IPPKH, PPKH, Lahan kompensasi), Rehabilitasi hutan (RHL, Lahan kritis), Perlindungan hutan (kriteria lindung), pemanfaatan jasa lingkungan (kerjasama) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Proses identifikasi lapangan yang semakin baik akan mampu menjamin perlindungan ekologis hutan di Pulau Jawa secara terukur dan terintegrasi.

Pelibatan sebanyak mungkin masyarakat desa di sekitar hutan diharapkan mampu mengakselerasi fungsi pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pasca penetapan SK 287 Tahun 2022, tentang Penetapan KHDPK, Pemerintah mempersiapkan penyusunan Peraturan Menteri LHK dalam mengakomodir dinamika dan fakta di lapangan dalam bentuk pedoman untuk KHDPK secara umum termasuk di dalamnya Perhutanan Sosial. Dengan Perhutanan Sosial ini diharapkan menjadi Solusi untuk mengakomodasi peluang Masyarakat secara legal untuk mengelola kawasan hutan secara Lestari dan ditujukan sebesarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

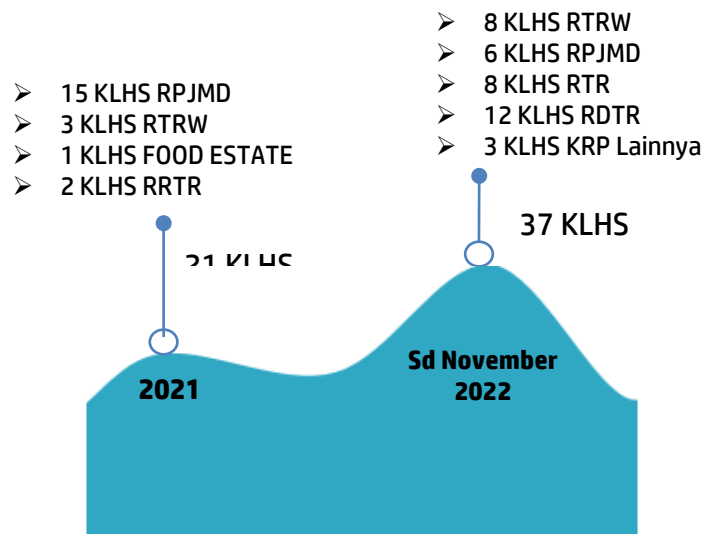
IKP : Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah

Pencegahan dampak lingkungan dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan. Upaya pencegahan dampak lingkungan dapat digolongkan menjadi dua bidang, yaitu pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Dalam upaya pengamanan lingkungan hidup, disusun beberapa instrumen perencanaan dan pencegahan dampak lingkungan. RPPLH, DDDTLH dan Informasi Ekoregion merupakan instrumen perencanaan yang disusun dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Sementara KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup merupakan instrumen pengendalian dampak lingkungan yang disusun dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009).

Sesuai Amanah UU Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menyusun RPPLH baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat perencanaan pembangunan dan spasial. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka pencapaian keluaran dokumen RPPLH antara lain melakukan penyusunan/penyempurnaan materi teknis RPPLH Nasional dan Rancangan Draft Peraturan Pemerintah serta Pertemuan terkait konsultasi publik dan fasilitasi penyusunan RPPLH Daerah. Hingga Oktober 2022, naskah urgensi penyusunan RPPLH Nasional telah selesai disusun, materi teknis RPPLH Nasional sedang dalam proses pembahasan dengan mitra terkait baik lingkup KLHK, Bappenas, Akademisi, Praktisi Lingkungan dan BRIN.

Untuk memberikan informasi dasar terkait dengan isu nasional yaitu kedaulatan pangan, kemandirian, dan ketahanan pangan, daya dukung dan daya tampung lahan prima perlu disusun dan ditetapkan melalui kegiatan verifikasi lapangan, penyusunan skor dan bobot, updating dan analisis data, penyusunan informasi DDDTLH, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan DDDTLH. Selain itu, penyusunan/update informasi ekoregion yang merupakan basis data dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta cadangan sumber daya alam masih tetap dilakukan dalam skala 1:250.000.

Dalam rangka peningkatan efektifitas KLHS, telah dilakukan kegiatan pelayanan validasi KLHS untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan, penjaminan kualitas serta pendokumentasian KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan. Pada tahun 2021, telah dilakukan pelayanan validasi KLHS pada 21 KLHS, antara lain 15 KLHS RPJMD, 3 KLHS RTRW, 1 KLHS Food Estate KHKP Provinsi Kalimantan Tengah, dan 2 KLHS RRTR (Masterplan IKN dan KSP Gugus Kepulauan Togean). Hingga November 2022, telah dikeluarkan persetujuan validasi untuk 37 KLHS yang meliputi 8 KLHS RTRW Provinsi, 6 KLHS RPJMD Provinsi 8 KLHS RTR, 12 KLHS RDTR dan 3 KLHS KRP Lainnya.



Salah satu kegiatan yang prioritas dilakukan diantaranya monitoring dan evaluasi KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan untuk pemutakhiran data dan informasi terkait dengan isu-isu strategis serta pengembangan *Conceptual Framework Monev* KLHS Food Estate Kalimantan Tengah terkait dengan perubahan isu strategis pembangunan berkelanjutan; perubahan KRP FE Kalimantan Tengah; Analisis Pengaruh KRP FE Kalimantan Tengah terhadap Kondisi LH; dan *environmental dan social safeguard Food Estate*.

Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, pada tahun 2021 dilakukan penyusunan *Policy Brief Forest City* Ibu Kota Negara (IKN). Kegiatan ini merupakan alur proses yang berkesinambungan dari tahun 2019 telah dilakukan penyusunan KLHS IKN dan di tahun 2020 telah dilakukan Pemetaan Ekoregion skala 1:50.000 di wilayah calon IKN, hingga di tahun 2021, dilakukan penyusunan Policy Brief IKN, yang menghasilkan suatu gambaran prinsip dan kriteria Forest City dalam perwujudan lingkungan, social budaya, ekonomi dan tata kelola.

Kegiatan Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi pada tahun 2021 dan 2022 berjalan sesuai dengan target dimana telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara

Partisipatif terkait dengan Air pada 7 Provinsi pada tahun 2021 dan 7 Provinsi pada tahun 2022. Kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air yang dilakukan untuk melakukan koreksi atas hasil *desk study* dari peta Indikatif yang dihasilkan. Dengan makin banyaknya titik verifikasi lapangan yang tervalidasi maka akurasi dari Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air semakin baik. Hal ini memberikan informasi bahwa kondisi lapangan sesuai dengan peta yang dihasilkan, diantaranya data dan informasi berdasarkan Hasil Pengukuran pH tanah dan Jenis Batuan Pada Koordinat Utama, Tekstur Tanah, Kondisi Bentang Alam, Aspek Topografi, Aspek Morfogenesis, Ketinggian serta Kemiringan Tempat.

Tabel 6 Lokasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif terkait dengan Air

NO	LOKASI KEGIATAN	TARGET 2020-2024	REALISASI	
			2021	2022
1	SUMATERA UTARA	√	√	
2	SUMATERA BARAT	√	√	
3	SUMATERA SELATAN	√	√	
4	KALIMANTAN BARAT	√		
5	KALIMANTAN TIMUR	√		
6	KALIMANTAN UTARA	√		
7	KALIMANTAN SELATAN	√		
8	SULAWESI UTARA	√		√
9	MALUKU UTARA	√		√
10	SULAWESI SELATAN	√		√
11	SULAWESI BARAT	√		√
12	BALI	√		
13	NUSA TENGGARA BARAT	√		
14	MALUKU	√		√
15	PAPUA	√	√	
16	JAWA BARAT	√		
17	JAWA TENGAH	√		
18	JAWA TIMUR	√		
19	DI YOGYAKARTA	√		
20	DKI JAKARTA	√		
21	BANTEN	√		
22	KEPULAUAN RIAU	√		
23	BANGKA BELITUNG	√		
24	JAMBI	√		
25	NUSA TENGGARA TIMUR	√		
26	GORONTALO	√		√
27	SULAWESI TENGAH	√		
28	PAPUA BARAT	√		
29	ACEH	√	√	
30	RIAU	√		
31	LAMPUNG	√	√	
32	BENGKULU	√		
33	KALIMANTAN TENGAH	√	√	
34	SULAWESI TENGGARA	√		√
TOTAL		34	7	7

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan, bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi bidang tata lingkungan diantaranya

memfasilitasi Penerapan Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) di daerah seperti sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan arahan tindak lanjutnya; Bimbingan teknis terkait ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Untuk menjalankan fungsi tersebut, terdapat kegiatan baru yang akan dilaksanakan oleh setiap Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yakni melalui Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH.

Selain itu, forum bimbingan teknis juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata lingkungan di daerah dan memperkuat instrumen tata lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penyelenggaraan RPPLH dan KLHS dengan mengintegrasikan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada tahun 2022, diseminasi Layanan Kajian Tata Lingkungan dilaksanakan pada seluruh wilayah kerja BPKHTL Wilayah I sampai XXII.

IKP: Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan diwajibkan untuk memiliki dokumen persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan yang diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah dilakukan melalui penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal, atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.

Pada tahun 2021 Pelaksanaan Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL dilakukan dengan Daring. Pelaksanaan Penilaian secara daring dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.5/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 Tentang Mekanisme Penilaian Dokumen Amdal Secara Daring Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Target penilaian dokumen AMDAL Tahun Anggaran 2021 yang masuk sebesar 40 dokumen, namun dalam kondisi pandemi COVID 19, target penilaian AMDAL diturunkan menjadi 30 dokumen. Jumlah target dokumen yang dinilai mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selama Tahun 2021 telah dilakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL sebanyak 155 dokumen (melebihi target renja).

Target permohonan pemeriksaan UKL-UPL pada awal tahun anggaran sebanyak 20 (dua puluh) formulir, namun di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan dampak pemotongan anggaran, target pemeriksaan UKL-UPL direvisi menjadi 15 (lima belas) formulir. Penilaian dokumen mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Seiring berjalannya tahun anggaran, Jumlah permohonan pemeriksaan UKL-UPL yang masuk di Tahun 2021 sebanyak 48 (empat puluh delapan) formulir.

Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu: audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan. Pada tahun 2021 telah dilakukan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 13 kegiatan.

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah, dimaksudkan agar Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Instansi Lingkungan Hidup di daerah mampu memberikan Pelayanan Publik terkait Izin Lingkungan melalui proses Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai NSPK. Pemenuhan terhadap NSPK dimaksud ditunjukkan oleh Bukti Administrasi Proses dan Kualitas/Mutu Dokumen Lingkungan (output) yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya meminimalisir/mengendalikan dampak negatif lingkungan (pencemaran dan kerusakan) pada tahap perencanaan kegiatan.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan evaluasi kinerja komisi penilai Amdal daerah dan evaluasi mutu dokumen Amdal dan pemeriksaan UK UPL Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- a. Evaluasi kinerja KPA (TUK) Daerah dan Evaluasi Mutu Dokumen Amdal pada 21 KPA (TUK) Provinsi yaitu Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Riau, Kalteng, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta.
- b. Evaluasi kinerja KPA (TUK) Daerah dan Evaluasi Mutu Dokumen Amdal pada 21 KPA (TUK) kabupaten/kota yaitu Kab.Singaraja, Kab.Bandung Barat, Kota Semarang, Kota Cilegon, Kota Tarakan, Kota Manado, Kota Palu, Kota Gorontalo, Kota Banjarmasin, Kota Pontianak, Kab. Barru, Kota Medan, Kota Palembang, Kab. Lombok Tengah, Kota Dumai, Kab.Katingan, Kab.Timur Tengah Selatan, Kota Malang, Kabupaten Manokwari, Kota Kendari, Kota Yogyakarta.
- c. Pemeriksaan UKL-UPL pada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Bau Bau.

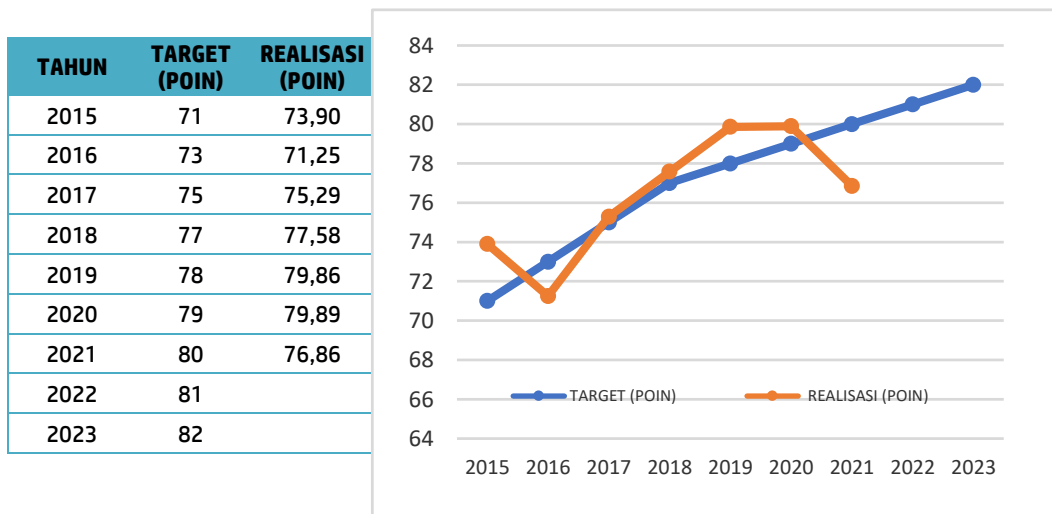
Hingga tahun 2022 berjalan, Sistem informasi Amdalnet tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan digitalisasi dokumen lingkungan yang digunakan dalam proses penyusunan, pemrosesan, penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan sampai dengan mengeluarkan rekomendasi atau keputusan kelayakan lingkungan baik di pusat maupun daerah yang dikelola secara online/elektronik. Hal ini memudahkan pelaku usaha dan pemerintah dalam mengurangi permasalahan administratif seperti penumpukan atau tercecernya dokumen, meminimalisir kesalahan input dan penulisan pada dokumen lingkungan, pembuatan dokumen lingkungan menjadi lebih terstruktur, dan pemanfaatan Web GIS untuk melakukan analisa spasial terhadap suatu lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan peta-peta yang terintegrasi dengan Amdal Web GIS.

IKP : Nilai SAKIP Ditjen PKTL

Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2021 adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 80 poin. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2021 dilakukan pada Tahun 2022, dengan hasil nilai sebesar 76,86 dengan kategori BB (sangat baik). Kategori tersebut bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai ini lebih kecil dari target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari nilai SAKIP yang telah dicapai pada tahun 2020.

Penurunan nilai ini bukan disebabkan oleh penurunan kualitas dan kinerja Ditjen PKTL, tetapi disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan yang dipergunakan dalam melakukan evaluasi SAKIP yang semula menggunakan Peraturan Menteri PAN RB nomor 12 tahun 2015 berubah menjadi Peraturan Menteri PAN RB nomor 88 tahun 2021 dimana terdapat perubahan perubahan indikator dan satker yang dijadikan evaluasi.

Pada tahun 2022 untuk sasaran Rencana Kerja (target) ditetapkan target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 81 poin. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2022 yang akan dinilai pada triwulan II tahun 2023



Gambar 9 Capaian Nilai SAKIP Ditjen PKTL

Penyusunan Rencana Operasional *Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030*

Upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia FOLU *Netsink* 2030 perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia. Indonesia FOLU *Netsink* 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian *zero deforestation* yang

merujuk pada kondisi dimana sudah tidak terjadi perubahan secara permanen lahan kategori hutan (berhutan) menjadi lahan kategori non hutan (tidak berhutan).

Pertemuan Negara Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Glasgow, UK tahun 2021 (*Conference of Parties, COP 26 UNFCCC*) menghasilkan *Glasgow Climate Pact* yang secara eksplisit berencana untuk mengurangi deforestasi, penggunaan batu bara serta target pengurangan emisi metana. Kesepakatan itu juga mendesak pengurangan emisi serta penggunaan emisi terbarukan dan menjanjikan lebih banyak bantuan pendanaan bagi negara-negara berkembang. Kesepakatan tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan, konservasi, restorasi alam dan ekosistem termasuk hutan dan ekosistem darat dan perairan yang berperan sebagai penyerap dan penyimpan GRK, melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan pengamanan sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang global.

Pertemuan Negara Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Paris tahun 2015 (*Conference of Parties, COP 21 UNFCCC*) menyepakati Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) dengan tujuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (a) menahan kenaikan suhu global dari tingkat suhu era pre-industrialisasi di bawah 2°C dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C. Atas hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Sebagai *National Focal Point* pada berbagai isu lingkungan hidup terutama pada perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertugas untuk menjembatani antara isu pada tingkat internasional dengan kepentingan dan kebijakan nasional. Memperhatikan hal tersebut, KLHK telah mengkoordinasikan penyusunan dokumen Strategi Implementasi NDC, *Roadmap* NDC Mitigasi, LTS-LCCR 2050, serta berbagai peraturan perundangan terkait bidang pengendalian perubahan iklim.

Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2021 berjalan, dilakukan kegiatan penyusunan Rencana Operasional *Forestry and Land Use* (FoLU) Net Sink 2030 dengan pendanaan kegiatan melalui anggaran pada DIPA Ditjen PKTL Tahun 2021. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 ini merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada tingkat tapak sektor kehutanan dan penggunaan lahan sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050, updated NDC 2030, serta memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 memberikan penjelasan atas rencana operasi lapangan dan perencanaan, evaluasi serta pengendalian.

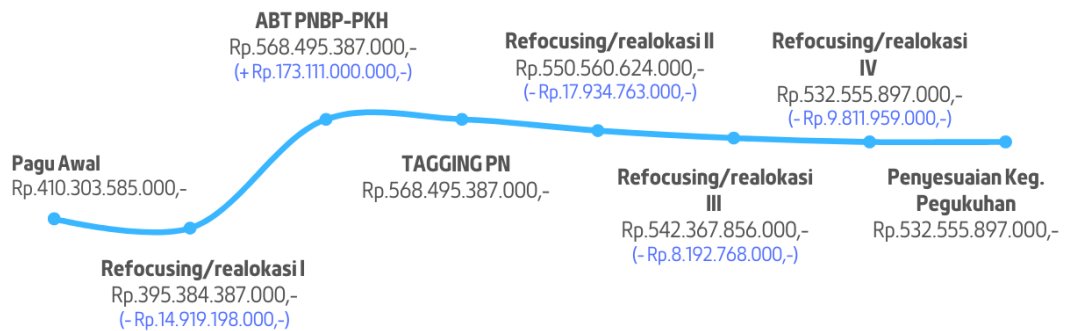
Pada tahun 2022, alokasi anggaran diberikan dalam rangka finalisasi penyusunan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 serta beberapa buku manual pendukung diantaranya IKN, Karhutla, Sustainable Forest Management (SFM), Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Konservasi, Perhutanan Sosial, serta Gambut/mangrove. Proses finalisasi penyusunan dokumen tersebut dilakukan melalui proses pembahasan,

diskusi public serta workshop Rencana Operasional Folu Net Sink 2030 dan manual. Selain itu, di tahun 2022 dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kawasan Hutan dalam rangka Impementasi Folu Net Sink 2030 di tingkat tapak yakni Wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tujuan penyusunan dokumen tersebut antara lain:

- b. Menjabarkan target NDC ke dalam detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
- c. Menentukan penanggungjawab rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
- d. Menetapkan rencana operasional aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
- e. Merumuskan tahapan evaluasi terhadap detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030.

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

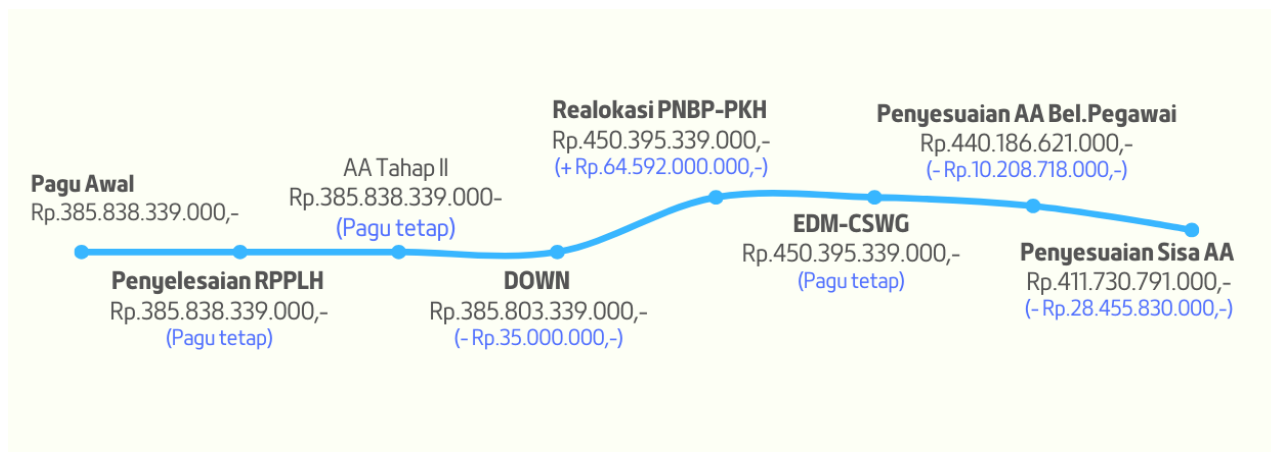
Capaian serapan anggaran tahun 2021 merupakan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, sedangkan prognosis serapan pada tahun 2022 merupakan perkiraan jumlah anggaran yang akan dimanfaatkan dalam mencapai target tahun 2022 yang telah ditetapkan.



Gambar 10 Perubahan Anggaran tahun 2021

Tabel 7 Serapan Anggaran Ditjen PKTL tahun 2021

PROGRAM	TAHUN 2021		
	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
Program Kualitas Lingkungan Hidup	25.851.973	25.767.308	99,67%
<i>Pencegahan Dampak Lingkungan</i>	<i>25.851.973</i>	<i>25.767.308</i>	<i>99,67%</i>
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	290.804.691	287.564.401	98,89%
<i>Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</i>	<i>253.724.471</i>	<i>250.897.760</i>	<i>98,89%</i>
<i>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</i>	<i>13.382.143</i>	<i>12.293.427</i>	<i>91,86%</i>
<i>Perencanaan Kawasan Hutan</i>	<i>23.698.077</i>	<i>23.373.214</i>	<i>98,63%</i>
Program Dukungan Manajemen	215.899.233	214.830.111	99,50%
<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL</i>	<i>215.899.233</i>	<i>214.830.111</i>	<i>99,50%</i>
Total	532.555.897	528.161.819	99,17%



Gambar 11 Perubahan Anggaran tahun 2022

Tabel 8 Prognosis Serapan Anggaran Ditjen PKTL tahun 2022

PROGRAM	TAHUN 2022			
	PAGU	PAGU DILUAR BLOKIR	REALISASI SD NOVEMBER 2022	PERSENTASE
Program Kualitas Lingkungan Hidup	17.245.771	13.626.223	8.499.256	62,37%
<i>Pencegahan Dampak Lingkungan</i>	<i>17.245.771</i>	<i>13.626.223</i>	<i>8.499.256</i>	<i>62,37%</i>
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	187.414.001	172.152.780	133.914.787	77,79%
<i>Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</i>	<i>143.696.469</i>	<i>133.728.747</i>	<i>104.504.002</i>	<i>78,15%</i>
<i>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</i>	<i>13.784.562</i>	<i>10.776.293</i>	<i>9.520.918</i>	<i>88,35%</i>
<i>Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</i>	<i>29.932.970</i>	<i>27.647.740</i>	<i>19.889.867</i>	<i>71,94%</i>
Program Dukungan Manajemen	235.526.849	225.951.788	185.417.768	82,06%
<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL</i>	<i>235.526.849</i>	<i>225.951.788</i>	<i>185.417.768</i>	<i>82,06%</i>
Total	440.186.621	411.730.791	360.351.916	87,52%
PROGNOSIS SD DESEMBER 2022			408.870.091	99,31%

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN RKP 2023	SASARAN PEMBANGUNAN 2023
Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" . Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian	Sasaran pembangunan tahun 2023 diantaranya: (1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; serta (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni:



Gambar 12 Tema dan Sasaran Pembangunan RKP 2023 (Perpres 108 Tahun 2022)

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023, dimana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pada 4 (empat) Prioritas Nasional



Tabel 9 Dukungan Ditjen PKTL tahun 2023 dalam Prioritas Nasional

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT
Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi
	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP
			SK Penetapan Kawasan Hutan
			Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT			
Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan						
04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN			
Prioritas Nasional 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing						
06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan			
			SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA			
			Data dan Areal Perhutanan Sosial			
Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim						
01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL			
			Dokumen RPPLH			
			Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion			
	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis		
				Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan		
				Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL		
			02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan
						Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL
						Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
						Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi

B. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 13 (tiga belas) kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk ke dalam 5 (lima) program yang memuat 13 (tiga belas) sasaran program dengan nomenklatur sama dengan sasaran strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Program (IKP) dengan nomenklatur sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP). Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa program bukan lagi representasi Unit Kerja Eselon I tetapi menjadi arah dan kebijakan di level kementerian bahkan nasional sehingga sejajar dengan sasaran strategis kementerian. Dari 5 (lima) program KLHK, terdapat 3 (tiga) program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu:

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan.

2. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa; meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

3. Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program di atas. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2023.

Untuk mencapai sasaran program di atas, ditetapkan rencana kegiatan dengan rincian output dan target pada masing-masing kegiatan yang telah mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

	MISI KLHK	TUJUAN KLHK	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM	IKP	PROGRAM	SASARAN UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I
Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"	M1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas	T.1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	T1.S1. Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	029.FD. Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1.1.7. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1. Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (83 Dokumen) T1.S1.1.7.2 Meningkatkan kesadaran sektor pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan (195 Laporan)
	M2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan	T.2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan hidup	T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	029.FF.Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4.1.5. Meningkatnya Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	T1.S4.1.5.1. Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (583 Layanan)
	M3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara	T.3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan	T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan kehutanan	T2.S4.1. Nilai PNBPFungsional KLHK	029.FF.Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T2.S4.1.2. Meningkatnya sumbangan PNBPFungsional Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1. Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku (300 Pemohon)
	M4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	T.4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	T3.S1.1 Tersesainya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan status penetapan	029.FF.Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S1.1.1. Tersesainya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk Kawasan konservasi) (14,9 Juta Hektar) T3.S1.1.1.2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (31 Layanan)
			T3.S2.1 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	029.FF.Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S2.1.1 Tersesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (10,1 Ribu Hektar)
			T4.S2.1 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	029.WA. Dukungan Manajemen	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (78 poin)

Gambar 13 Target Kinerja Ditjen PKTL tahun 2023

Pada tahun 2023, arah kebijakan penganggaran dan target kinerja pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, antara lain:



PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan 5436 – Pencegahan Dampak Lingkungan

UKE II

- Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (Dit. PDLKWS)
- Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (Dit.PDLUK)
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL)

1

Penyelesaian Materi Teknis Dokumen RPPLH 2025-2055; Rancangan PP terkait RPPLH, penyelenggaraan verifikasi RPPLH Provinsi dan ibukota provinsi;

2

Penyediaan data dan informasi ecoregion, informasi Pendukung D3TLH Lahan Prima, penyelenggaraan fasilitasi D3TLH Daerah serta penyusunan draft Rancangan Permen Penyelenggaraan D3TLH;

3

Penyusunan Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan/Pedoman terkait pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; dan Penghitungan Valuasi Ekonomi di Daerah

4

Penyelesaian Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air

5

Penguatan Penyelenggaraan KLHS (Pengembangan NSPK, kelembagaan dan SDM KLHS, asistensi teknis/validasi KLHS RTRW dan RPJMD, dan monerv KLHS)

6

Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup

7

Peningkatan Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

8

Peningkatan pelayanan kajian tata lingkungan di wilayah BPKHTL

TARGET PRIORITAS TAHUN 2023 PADA PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, pelaksanaan Program Kualitas Lingkungan Hidup dijabarkan ke dalam **Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan**. Kondisi yang ditargetkan dalam sasaran kegiatan serta indikator kinerja antara lain:

Tabel 10 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UKE II
T1.S1.1.7.1. Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan		
T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (<i>Enviromental Safeguard</i>)	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program <i>(30 Dokumen KLHS)</i>	Dit. PDLKWS
	T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan <i>(1 Dokumen)</i>	Dit. PDLKWS
T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (<i>Enviromental Safeguard</i>)	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program <i>(9 Dokumen)</i>	Dit. PDLKWS
T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH <i>(22 Layanan)</i>	BPKHTL
T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air <i>(65 Juta Hektar)</i>	Dit. PDLKWS
	T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH <i>(20 Dokumen)</i>	BPKHTL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UKE II
T1.S1.1.7.2 Meningkatnya kesadaran sektor dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan		
T1.S1.1.7.2.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1 Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup <i>(1 Sistem)</i>	Dit PDLUK
T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH <i>(22 Layanan)</i>	BPKHTL
T1.S1.1.7.2.3 Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1 Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan <i>(170 Layanan)</i>	Dit PDLUK
T1.S1.1.7.2.4 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.2.4.1 Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi <i>(2 Layanan)</i>	Dit PDLUK

PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN

Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) 6744 - Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 2) 5433 - Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 3) 5434 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
UKE II	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Dit. RPKHPWPH) • Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Dit.PPKH) • Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Dit. IPSDH) • Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL)

Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan dengan target kinerja yang akan dicapai dari masing-masing antara lain:

Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP dalam rangka proses review dan perubahan terhadap penetapan wilayah KPH yang mengalami perubahan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi Pengelolaan kawasan hutan. 2) penyediaan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030, melalui telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang dengan kawasan hutan, fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, serta penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan. 3) Peningkatan Potensi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan cara meningkatkan pelayanan perizinan PPKH melalui penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan. Peningkatan dan optimalisasi PNBK-PKH melalui pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembayaran PNBK-PKH oleh wajib bayar untuk menghindari kerugian negara juga menjadi prioritas melalui verifikasi terhadap kewajiban pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4) Penyediaan data areal perhutanan sosial melalui identifikasi areal perhutanan sosial.
--	---

<p>Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi). Tujuan penetapan kawasan hutan dalam hal ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan serta memberikan kepastian dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2023 yakni percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100%. 2) Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2020-2024. 3) Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 4) Penyiapan pelepasan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan. 5) Penyediaan Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.
<p>Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. 2) Penyediaan Layanan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (<i>One Map Policy</i>). Dalam hal ini, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup KLHK, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) bertugas sebagai Walidata JIG KLHK yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, penjaminan kualitas, dan pengelolaan DG dan IG yang berasal dari Produsen Data Geospasial yaitu eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta penyebarluasan kepada pengguna yang dibantu oleh 22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), sesuai wilayah kerjanya.

Tabel 11 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UKE II
T1.S4.1.5.1. Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
T1.S4.1.5.1.1. Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH	T1.S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP <i>(530 Peta)</i>	Dit. RPKHPWPH
T1.S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan <i>(30 Layanan)</i>	Dit. RPKHPWPH
	T1.S4.1.5.1.2.2 Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP <i>(2 Layanan)</i>	Dit. RPKHPWPH
	T1.S4.1.5.1.2.3. Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030 <i>(8 Dokumen)</i>	Dit. RPKHPWPH
	T1.S4.1.5.1.2.4 Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK) <i>(4 Dokumen)</i>	Dit. RPKHPWPH
T1.S4.1.5.1.3 Tersedianya data areal perhutanan sosial	T1.S4.1.5.1.3.1. Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial <i>(9 Rekomendasi)</i>	Dit. RPKHPWPH
T2.S4.1.2.1. Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku		
T2.S4.1.2.1.1. Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	T2.S4.1.2.1.1.1. Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan <i>(300 Dokumen)</i>	Dit. RPKHPWPH
	T2.S4.1.2.1.1.2. Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH <i>(100 Unit)</i>	BPKHTL
	T2.S4.1.2.1.1.3. Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala <i>(12 Kali Update)</i>	Dit. RPKHPWPH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UKE II
T3.S1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk Kawasan konservasi)		
T3.S1.1.1.1.1 Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	T3.S1.1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) <i>(14,9 Juta Hektar)</i>	Dit PPKH
	T3.S1.1.1.1.1.2 Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan <i>(1 Judul)</i>	Dit PPKH
	T3.S1.1.1.1.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga <i>(40.534 km)</i>	BPKHTL
T3.S1.1.1.2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan		
T3.S1.1.1.2.1 Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	T3.S1.1.1.2.1.1 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses <i>(30 Pemohon)</i>	Dit PPKH
	T3.S1.1.1.2.1.2 Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN <i>(41,4 Ribu Hektar)</i>	Dit PPKH
T3.S2.1.1.1. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA		
T3.S2.1.1.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1 kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA <i>(10,1 Ribu Hektar)</i>	Dit PPKH
	T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH <i>(4 Provinsi)</i>	BPKHTL
T1.S4.1.6.1. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan		
T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan <i>(3 Dokumen)</i>	Dit IPSDH
	T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan <i>(2 Laporan)</i>	Dit IPSDH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UKE II
	T1.S4.1.6.1.1.3. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH <i>(44 Klaster)</i>	BPKHTL
	T1.S4.1.6.1.1.4. Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut <i>(2 SK dan Peta)</i>	Dit IPSDH
	T1.S4.1.6.1.1.5. Data dan Informasi Deforestasi Indonesia <i>(1 Dokumen)</i>	Dit IPSDH
	T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH <i>(22 Layanan)</i>	BPKHTL
T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	T1.S4.1.6.1.2.1. Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK <i>(1 Laporan)</i>	Dit IPSDH

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan 5432 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

UKE II Seluruh Satker Lingkup Ditjen PKTL

Pencapaian Program Dukungan Manajemen dijabarkan ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, melalui pencapaian target nilai SAKIP, level maturitas SPIP serta laporan keuangan. SAKIP ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, sehingga instansi tersebut telah berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

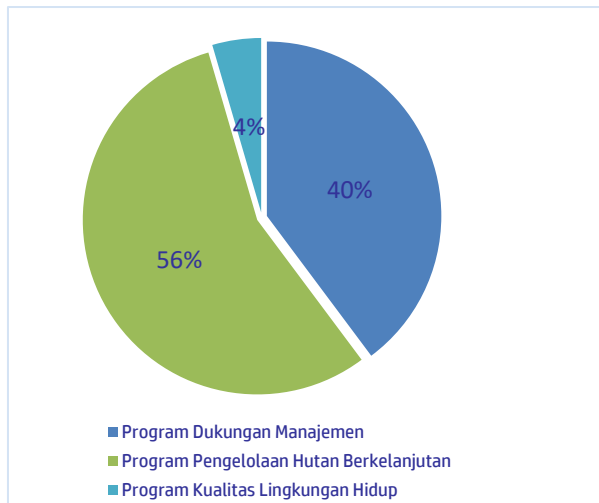
Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran.

Tabel 12 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen tahun 2023

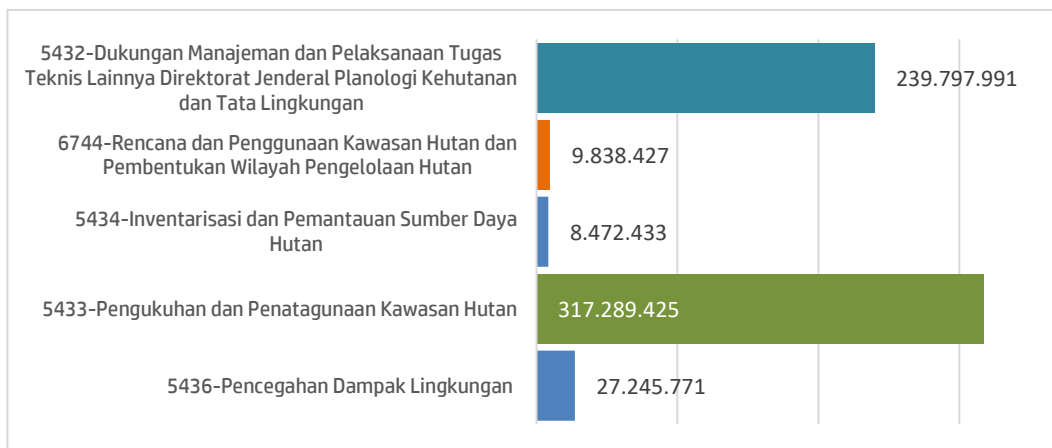
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UKE II
T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan <i>(82 Poin)</i>	Seluruh Satker
	T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan <i>(3 Level)</i>	
	T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel <i>(1 Dokumen)</i>	

C. KERANGKA PENDANAAN BELANJA TAHUN 2023

Berdasarkan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.38/MENLHK/SETJEN/REN.0/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Hal Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023, Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp.602.644.047.000,-



PROGRAM	JENIS BELANJA / SUMBER DANA		BELANJA NON OPS		TOTAL
	BELANJA OPS PEGAWAI RM	BARANG RM	RM	PNP	
Program Dukungan Manajemen	154.370.130	49.913.461	35.514.400		239.797.991
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			262.801.448	72.798.837	335.600.285
Program Kualitas Lingkungan Hidup			26.837.771	408.000	27.245.771
TOTAL	154.370.130	49.913.461	325.153.619	73.206.837	602.644.047



Gambar 14 Sebaran Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2023

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka perumusan output kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi dalam Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) dan Rincian Ouput (RO). Pada tahun 2023, seluruh kegiatan akan dilaksanakan oleh 23 (dua puluh tiga) satker, dengan KRO-RO sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13 Sebaran KRO-RO per kegiatan Tahun 2023

KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23 layanan	32.546.186
		994-Layanan Perkantoran	23 Layanan	204.283.591
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	55 unit	514.830
		971-Layanan Prasarana Internal	4 unit	2.453.384
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	392.000
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Layanan	500.000
		001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	4 Rekomendasi Kebijakan	7.546.080
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	22 Rekomendasi Kebijakan	295.486.444
		003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22 Rekomendasi Kebijakan	10.764.901
		004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4 Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
		005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1 Layanan	950.000
		002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	44 Layanan	2.961.008
		003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	22 Layanan	2.311.425
		004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1 Layanan	1.500.000

KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)
		005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 Layanan	375.000
		006-Data dan informasi deforestasi	1 Layanan	125.000
		007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2 Layanan	250.000
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7 Rekomendasi Kebijakan	700.000
		005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	1 Rekomendasi Kebijakan	1.430.000
		006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	440.000
		007-Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	4.694.085
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170 Layanan	1.219.350
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	1.051.523
		002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	20 Layanan	9.136.000
		003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	385.000
		004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	22 Layanan	1.100.000
		005-Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan	22 Layanan	1.100.000

KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	
		Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL			
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30 Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.989.813	
		002-Penyusunan Rencana kehutanan	3 Rekomendasi Kebijakan	544.000	
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000	
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100 Badan Usaha	5.477.852	
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300 Layanan	1.888.575	
		002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 Layanan	200.000	
		003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3 Layanan	270.000	
		004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12 Layanan	498.000	
		001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1 Layanan	310.000	
		005-Data dan Areal Perhutanan Sosial	1 Layanan	500.000	
		BAH-Pelayanan Publik Lainnya			
		QMA-Data dan Informasi Publik			
TOTAL				602.644.047	

D. PENGUATAN BELANJA TAHUN 2023 (*BUDGET TAGGING*)

1. Penandaan Anggaran Prioritas Nasional

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) Prioritas Nasional melalui beberapa program dan kegiatan baik dari segi penguatan upaya pencegahan dampak lingkungan maupun pembangunan hutan berkelanjutan sebesar **57,15 %** dari total anggaran tahun 2023.

PN / RINCIAN OUTPUT	Anggaran (Ribu rupiah)
Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	307.612.868
Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.000.000
Prioritas Nasional 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	9.646.080
Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	26.194.248
TOTAL	344.453.196

2. Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (*Climate Budget Tagging*)

Untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal ini berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Telah dilakukan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (*Climate Budget Tagging*) yakni penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penandaan ini dilakukan untuk memperkuat kerangka fiskal Indonesia dalam rangka implementasi kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai Output yang spesifik dari kegiatan yang terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung).

TEMATIK	RO	Anggaran (Ribu rupiah)
004 - Mitigasi perubahan iklim	(1) Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	325.307.943 <i>(53,98% dari total pagu Ditjen PKTL tahun 2023)</i>
	(2) Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	
	(3) Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	
	(4) Penyusunan Rencana kehutanan	
	(5) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	
	(6) Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	
	(7) SK Penetapan Kawasan Hutan	
	(8) Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	
004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim (Co-Benefit)	(1) Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	17.262.336 <i>(2,86% dari total pagu Ditjen PKTL tahun 2023)</i>
	(2) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
	(3) Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	
	(4) Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	
	(5) Dokumen RPPLH	

3. Penandaan Anggaran Responsif Gender

TEMATIK	Anggaran (Ribu rupiah)
003 - Anggaran Responsif Gender	320.877.430 <i>(53,24% dari total pagu Ditjen PKTL tahun 2023)</i>

Tagging dilakukan pada beberapa Rincian Output, yakni:

- (1) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL,
- (2) Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL,
- (3) Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan,
- (4) Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan,
- (5) Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan,
- (6) Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan, serta
- (7) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan Pengarusutamaan Gender, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan tagging anggaran pada beberapa kegiatan yang responsif gender pada tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Renja ini menjadi acuan dan pedoman bagi segenap satker dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023.

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana strategis dapat tercapai.

Dengan anggaran yang tersedia, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya untuk mencapai target-target prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengusung langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, komitmen untuk mengimplementasikan rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 dan DIPA TA. 2023 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KRO	INDIKATOR KRO	RO	INDIKATOR RO	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	UKE II PELAKSANA	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	JANPRES	NAWACITA	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								27.245.771										
Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan								27.245.771										
T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Environmental Safeguard)	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	30	Dokumen KLHS	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan terlaksana sampai dengan penerbitan dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Fasilitasi dan Pembinaan terlaksana sampai dengan penerbitan dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	30 Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.989.813	Pusat	DIT-PDLKWS	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim	-	
	T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1	Dokumen	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi Kebijakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan diimplementasikan dalam pembangunan	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	Rekomendasi hasil Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan diimplementasikan dalam pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	440.000	Pusat	DIT-PDLKWS	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik	-	
T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Environmental Safeguard)	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	9	Dokumen	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi Kebijakan RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion	004-Dokumen RPPLH	Dokumen RPPLH yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	7 Rekomendasi Kebijakan	700.000	Pusat	DIT-PDLKWS	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim	-	
				PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	1 Rekomendasi Kebijakan	1.430.000	Pusat	DIT-PDLKWS	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik	-	
T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	22	Layanan	QMA-Data dan Informasi Publik	Pelayanan Kajian Tata Lingkungan di wilayah Kerja BPKHTL	004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Pelayanan Kajian Tata Lingkungan di wilayah Kerja BPKHTL	22 Layanan	1.100.000	22 BPKHTL	DIT-PDLKWS - BPKHTL	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik	-	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KRO	INDIKATOR KRO	RO	INDIKATOR RO	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	UKE II PELAKSANA	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	JANPRES	NAWACITA		
T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	65	Juta Hektar	QMA-Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	Penyediaan data dan informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani	1	Layanan	1.051.523	Pusat	DIT-PDLKWS	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim	-	-
	T1.S1.1.7.1.4.2 Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	20	Dokumen	QMA-Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	20	Layanan	9.136.000	19 Provinsi	DIT-PDLKWS-BPKHTL	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim	-	-
T1.S1.1.7.2.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1 Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	1	Sistem	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi Kebijakan sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	007-Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	1	Rekomendasi Kebijakan	4.694.085	Pusat	DIT-PDLUK	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan iklim	-	-
T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	22	Layanan	QMA-Data dan Informasi Publik	Pelayanan Kajian Tata Lingkungan di wilayah Kerja BPKHTL	005-Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Pelayanan Kajian Tata Lingkungan di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.100.000	22 BPKHTL	DIT-PDLUK-BPKHTL	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik	-	-
T1.S1.1.7.2.3 Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1 Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170	Layanan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170	Layanan	1.219.350	Pusat	DIT-PDLUK	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KRO	INDIKATOR KRO	RO	INDIKATOR RO	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	UKE II PELAKSANA	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	JANPRES	NAWACITA	
T1.S1.1.7.2.4 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.2.4.1 Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	2	Layanan	QMA-Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi hasil identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Layanan	385.000	Pusat	DIT PDLUK	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim	-	-
PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN								335.600.285										
Kegiatan : Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan								9.838.427										
T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH	T1.S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530	Peta	QMA-Data dan Informasi Publik	Seluruh permohonan penyusunan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP terlayani	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1	layanan	310.000	Pusat	DIT RPKHPWPH	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	000 - Bukan Tematik	-	-
T1.S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	Layanan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Terselesaikannya Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	layanan	200.000	Pusat	DIT RPKHPWPH	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-
	T1.S4.1.5.1.2.2 Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	2	Layanan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Terfasilitasinya usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3	layanan	270.000	Pusat	DIT RPKHPWPH	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-
	T1.S4.1.5.1.2.3 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	8	Dokumen	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan sesuai Rencana kehutanan diterbitkan	002-Penyusunan Rencana kehutanan	3	Rekomendasi Kebijakan	544.000	Pusat	DIT RPKHPWPH	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KRO	INDIKATOR KRO	RO	INDIKATOR RO	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	UKE II PELAKSANA	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	JANPRES	NAWACITA
	T1.54.1.5.1.2.4 Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	4	Dokumen	ABV- Kebijakan Bidang Kehutanan	Jumlah rekomendasi kebijakan atas Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	003- Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	Jumlah rekomendasi kebijakan atas Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK) yang disusun	150.000	Pusat	DIT RPKHPWPH	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-
T1.54.1.5.1.3 Tersedianya data areal perhutanan sosial	T1.54.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	9	Rekomendasi	QMA-Data dan Informasi Publik	Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial terlayani	500.000	Pusat	DIT RPKHPWPH	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	000 - Bukan Tematik	-	-
T2.54.1.2.1.1. Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBPNP penggunaan kawasan hutan	T2.54.1.2.1.1.1. Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBPNP Penggunaan Kawasan Hutan	300	dokumen	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan penyediaan Data Informasi PNBPNP Penggunaan Kawasan Hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBPNP Penggunaan Kawasan Hutan	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan penyediaan Data Informasi PNBPNP Penggunaan Kawasan Hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1.888.575	Pusat	DIT RPKHPWPH							
	T2.54.1.2.1.1.2. Hasil Verifikasi PNBPNP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	Unit	BAC- Pelayanan Publik kepada badan usaha	Pelaksanaan Verifikasi PNBPNP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL terlaksana	001-Hasil Verifikasi PNBPNP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Pelaksanaan Verifikasi PNBPNP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL terlaksana	5.477.852	19 PROVINSI	DIT RPKHPWPH - BPKHTL							
	T2.54.1.2.1.1.3. Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12	Kali Update	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	498.000	Pusat	DIT RPKHPWPH							
Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan								8.472.433									
T1.54.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi SDH	T1.54.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	3	Dokumen	BMA-Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun	950.000	Pusat	DIT IPSDH	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KRO	INDIKATOR KRO	RO	INDIKATOR RO	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	UKE II PELAKSANA	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	JANPRES	NAWACITA	
	T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	Laporan		007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan		2	layanan	250.000	Pusat	DIT IPSDH	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-	
	T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	44	Klaster		002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	44	layanan	2.961.008	15 Provinsi	DIT IPSDH - BPKHTL	-	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender	-	-	
	T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	SK & Peta		005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Penyampaian Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode I dan II	2	layanan	375.000	Pusat	DIT IPSDH	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-	
	T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	1	Dokumen		006-Data dan informasi deforestasi	Penyediaan Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	1	layanan	125.000	Pusat	DIT IPSDH	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-	
	T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan		003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Penyediaan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	22	layanan	2.311.425	22 BPKHTL	DIT IPSDH - BPKHTL	-	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender	-	-	
T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	T1.S4.1.6.1.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	Laporan		004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	Penyediaan Informasi Geospasial Tematik terlayani dan diperbaharui secara berkala sesuai ketentuan	1	layanan	1.500.000	Pusat	DIT IPSDH	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-	
Kegiatan : Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan									317.289.425									
T3.S1.1.1.1.1 Tersesainya penetapan seluruh kawasan hutan	T3.S1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi	14,9	Juta Hektar	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	SK Penetapan Kawasan Hutan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22	Rekomendasi Kebijakan	10.764.901	Pusat	DIT PPKH	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	004 - Mitigasi perubahan iklim	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KRO	INDIKATOR KRO	RO	INDIKATOR RO	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	UKE II PELAKSANA	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	JANPRES	NAWACITA	
	T3.S1.1.1.1.1.2 Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Judul	BMA-Data dan Informasi Publik	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan	500.000	Pusat	DIT PPKH	-	-	-	-	-	-	
	T3.S1.1.1.1.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak Hak Pihak Ketiga	40.534	Km	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	22	Rekomendasi Kebijakan	295.486.444	22 Provinsi	DIT PPKH - BPKHTL	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan iklim	-	-
	T3.S1.1.1.1.1.4 Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	-	Dokumen	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Seluruh permohonan pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	002-Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T3.S1.1.1.2.1 Tersesainya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	T3.S1.1.1.2.1.1 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	30	Pemohon	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	Layanan	392.000	Pusat	DIT PPKH	-	-	-	-	-	-	-
	T3.S1.1.1.2.1.2 Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	41	Ribu Hektar	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Seluruh permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN	2	Layanan	1.000.000	Pusat	DIT PPKH	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	004 - Mitigasi perubahan iklim	-	-
T3.S2.1.1.1.1 Tersesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1 Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	10,1	Ribu Hektar	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000	Pusat	DIT PPKH	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	000 - Bukan Tematik	-	-
	T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	4	Provinsi	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL diterbitkan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	4	Rekomendasi Kebijakan	7.546.080	5 Provinsi	DIT PPKH - BPKHTL	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan iklim	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	KRO	INDIKATOR KRO	RO	INDIKATOR RO	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	UKE II PELAKSANA	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	JANPRES	NAWACITA		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								239.797.991											
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan								239.797.991											
T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	Poin	EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal	1) Layanan Perkantoran terlaksana	962-Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	23	Layanan	32.546.186	Seluruh Satker	Seluruh Satker Lingkup Ditjen PKTL	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-
	T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	Level		2) Layanan Dukungan Manajemen terlaksana	994-Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	23	Layanan	204.283.591	Seluruh Satker		-	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-
	T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	Dokumen	EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1) Layanan Sarana Internal terlaksana	951-Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal terlaksana	55	Unit	514.830			-	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-
					2) Layanan Prasarana Internal terlaksana	971-Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal terlaksana	4	Unit	2.453.384			-	-	-	-	000 - Bukan Tematik	-	-
TOTAL										602.644.047									

Lampiran 2 Dukungan/Modalitas Kegiatan Tahun 2023 Lingkup Ditjen PKTL

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP							
Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan							
T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (<i>Environmental Safeguard</i>)	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	UU 32 Tahun 2009 ttg Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan, UU 4 Tahun 2011 ttg Informasi Geospasial PP 46 Tahun 2017 ttg IELH PP 22 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat PDLKWS ±52 orang Pengendali Dampak Lingkungan sebanyak 5 orang Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter
			T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan			
	T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (<i>Environmental Safeguard</i>)	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	004-Dokumen RPPLH 005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	PermenLHK 46 Tahun 2016 ttg Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peraturan Direktur Jenderal PKTL no.P4/PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021 ttg Petunjuk Teknis Verifikasi			

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
		T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air SK MenLHK 297 tahun 2019 ttg Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional		
		T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi			
			T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL			
	T1.S1.1.7.2 Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam	T1.S1.1.7.2.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1 Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	007-Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	UU 32 Tahun 2009 ttg Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan, PP 22 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perlindungan dan	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLUK Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat PDLKWS ±54 orang	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
	mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	005-Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Pengelolaan LH PP 5 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Pengendali Dampak Lingkungan sebanyak 18 orang Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	
T1.S1.1.7.2.3 Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan		T1.S1.1.7.2.3.1 Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan				
T1.S1.1.7.2.4 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi		T1.S1.1.7.2.4.1 Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi				
PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN							
Kegiatan : Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan							
T1.S4.1.5 Meningkatnya Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	T1.S4.1.5.1 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan	T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH	T1.S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPKHPWPH Jumlah SDM yang tersedia pada	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
	berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	T1.S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030	<p>T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RD TR/RTRKSN) dengan kawasan hutan</p> <p>T1.S4.1.5.1.2.2 Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP</p> <p>T1.S4.1.5.1.2.3 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030</p> <p>T1.S4.1.5.1.2.4 Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)</p>	<p>002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan</p> <p>003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP</p> <p>002-Penyusunan Rencana kehutanan</p> <p>003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)</p>	<p>Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>Permenhut P.01/menhut-II/2012 ttg Pedoman Penyusunan RKTP</p> <p>PermenLHK P.83/MENLHK/SETJEN/KU M.1/10/2016 ttg Perhutanan Sosial</p>	Direktorat RPKHPWPH ±95 orang	

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
		T1.S4.1.5.1.3 Tersedianya data areal Perhutanan Sosial	T1.S4.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial			
T2.S4.1.2 Meningkatnya sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1 Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	T2.S4.1.2.1.1. Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	T2.S4.1.2.1.1.1. Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPKHPWPH Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat RPKHPWPH ±95 orang Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	
			T2.S4.1.2.1.1.2. Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL			
			T2.S4.1.2.1.1.3. Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala			
Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan							
T1.S4.1.6 Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan Perpres 9 tahun 2016 ttg Percepatan Pelaksanaan KSP	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat IPSDH Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat IPSDH	Dukungan peralatan Teknis : GPS (± 1.207 unit) Kompas (±527 unit)
			T1.S4.1.6.1.1.2	007-Data dan Informasi			

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
			Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Perdirjen PKTL P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1.2017 ttg petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya Masyarakat pada KPHL dan KPHP.	±67 orang Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	Spiegel Relascope (±191 unit)
		T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL				
		T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut				
		T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	006-Data dan informasi deforestasi				

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
			T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL			
		T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	T1.S4.1.6.1.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK			
Kegiatan : Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan							
T3.S1.1.1 Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	T3.S1.1.1.1.1 Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	T3.S1.1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	PP 21 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PPKH Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat PPKH ±115 orang Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	Dukungan peralatan Teknis : GPS (± 1.207 unit) Kompas (±527 unit)
			T3.S1.1.1.1.1.2 Informasi dan dokumentasi penguohan dan penatagunaan kawasan hutan	001-Informasi dan dokumentasi penguohan dan penatagunaan kawasan hutan	PermenLHK 8 Tahun 2021 ttg Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta		
			T3.S1.1.1.1.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan			
			T3.S1.1.1.1.1.4	002-Layanan			

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
			Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Pengendalian pemantapan kawasan hutan	Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Perpres 88 Tahun 2017 ttg Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan		
	T3.S1.1.1.2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	T3.S1.1.1.2.1 Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	T3.S1.1.1.2.1.1 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan			
			T3.S1.1.1.2.1.2 Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN			
T3.S2.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1 Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA			
			T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan			

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan							
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	962-Layanan Umum		Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): SETDITJEN PKTL	Jumlah SDM yang tersedia pada Ditjen PKTL ±1.782 orang
			T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	994-Layanan Perkantoran			
			T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	951-Layanan Sarana Internal			
				971-Layanan Prasarana Internal			

Lampiran 3 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup					
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7	Rekomendasi Kebijakan	700.000
		051-Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional	1	Dokumen	
		052-Fasilitasi Penyusunan RPPLH Daerah	6	Laporan	
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	1	Rekomendasi Kebijakan	1.430.000
		051-Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1	Dokumen	
		052-Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion	1	Dokumen	
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1	Rekomendasi Kebijakan	440.000
		051-Pengembangan NSPK Instrumen Ekonomi LH	1	dokumen	
		052-Fasilitasi dan Monev Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	21	laporan	
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Layanan	1.051.523
		051-Penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	65	Juta Ha	
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.989.813
		051-Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	30	Daerah/Kab/Kota	
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	20	Layanan	9.136.000
		051-Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	20	dokumen	
		052-Dukungan Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	20	layanan	
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.100.000
		051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	22	Layanan	
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.100.000
		051-Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang Usaha dan Kegiatan	22	Layanan	
5436-	PBJ-	007-Sistem kajian dampak lingkungan	1	Rekomendasi	4.694.085

PROGRAM / KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)
Pencegahan Dampak Lingkungan	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan		Kebijakan/ Kajian	
		051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan	40	Rekomendasi	
		052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun perorangan dan LPJP	150	Dokumen	
		053-Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1	NSPK	
		054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	1	Laporan	
		055-Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1	Sistem	
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170	Layanan	1.219.350
		051-Penilaian Amdal Adendum Andal dan RKL RPL serta Penerbitan SKKL	75	Layanan	
		052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	60	Layanan	
		053-Penilaian audit lingkungan hidup	15	Layanan	
		054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	20	Laporan	
		055-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup	1	Laporan	
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Layanan	385.000
		051-Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1	dokumen/peta	
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Permohonan kajian tata Lingkungan di wilayah IKN	1	Layanan	PM
		051-Fasilitasi Kajian Tata Lingkungan di wilayah IKN	1	Layanan	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan					
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	Layanan	392.000
		051-Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	layanan	
		052-Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	1	Layanan	
		053-Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	1	Layanan	
		054-Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	1	Layanan	
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan	500.000
		051-Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan	

PROGRAM / KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)
		052-Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawsasan hutan	1	Dokumen	
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22	Rekomendasi Kebijakan/ Kajian	10.764.901
		051-Penelaahan substansi Penetapan Kawasan Hutan	22	Provinsi	
		053-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka penetapan Kawasan Hutan	22	Layanan	
		055-Penelaahan Sustansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	34	Layanan	
		056-Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	1	Layanan	
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.600.000
		051-Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan yang dilepaskan nutuk TORA	10	ribu Hektar	
		052-Pemutakhiran Data dan Peta TORA	4	Dokumen	
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	2	Layanan	1.000.000
		051-Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk IKN	41.400	Hektar	
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	4	Rekomendasi Kebijakan	7.546.080
		052-Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.099	Km	
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	22	Rekomendasi Kebijakan	295.486.444
		051-Penataan batas kawasan hutan (reguler)	40.534	Km	
5434- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1	layanan	950.000
		051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1	Dokumen	
		052-Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	1	Dokumen	
5434- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	layanan	1.500.000
		051-Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik LHK yang Terintegrasi dengan Portal Nasional	1	Layanan	
5434- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	layanan	375.000
		051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif	1	SK dan Peta	

PROGRAM / KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)
		052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif	1	Laporan	
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan informasi deforestasi	1	layanan	125.000
		051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1	Layanan	
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	layanan	250.000
		051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	Laporan	
		052-Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional	1	Dokumen	
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	44	layanan	2.961.008
		051-Inventarisasi Hutan Nasional	44	Klaster	
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	22	layanan	2.311.425
		051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	22	BPKH	
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penyusunan Rencana kehutanan	3	Rekomendasi Kebijakan	544.000
		051-Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	1	Rekomendasi Kebijakan	
		052-Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	1	Rekomendasi Kebijakan	
		053-Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1	Rekomendasi Kebijakan	
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1	Rekomendasi Kebijakan	150.000
		051-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1	Rekomendasi Kebijakan	
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300	layanan	1.888.575
		051-Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	300	Pemohon	
		052-Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1	Document	
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	layanan	200.000
		051-Penelaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	Layanan	

PROGRAM / KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)
Wilayah Pengelolaan Hutan					
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3	layanan	270.000
		051-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3	Layanan	
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12	layanan	498.000
		051-Penyusunan/Update Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12	Layanan	
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1	layanan	310.000
		051-Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	530	Peta (update)	
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial	1	layanan	500.000
		051-Data Areal Perhutanan Sosial	1	Dokumen	
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	Badan usaha	5.477.852
		051-Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	100	Laporan	
029.WA-Program Dukungan Manajemen					
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23	Layanan	32.546.186
		051-Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	5	Dokumen	
		052-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	Dokumen	
		053-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	2	Dokumen	
		056-Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	3	Dokumen	
		059-Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL	22	Layanan	
		060-Layanan Dukungan Manajemen	1	Layanan	

PROGRAM / KEGIATAN	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)
		Direktorat PPKH			
		061-Layanan Dukungan Management Direktorat IPSDH	1	Layanan	
		062-Layanan Dukungan Managemen Direktorat RPKHPWPH	1	Layanan	
		063-Layanan Dukungan Managemen Direktorat PDLKWS	1	Layanan	
		064-Layanan Dukungan Managemen Direktorat PDLUK	1	Layanan	
		065-Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1	Layanan	
		066-Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional	1	Layanan	
		067-Layanan Organisasi dan Tatalaksana	1	Layanan	
		068-Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1	layanan	
		069-Layanan kearsipan	1	Layanan	
		070-Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	1	layanan	
		071-Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1	Layanan	
		072-Layanan Kerjasama Teknik	1	Layanan	
		073-Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	1	Layanan	
5432- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	23	Layanan	204.283.591
		001-Gaji dan Tunjangan	23	Layanan	154.370.130
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	23	Layanan	49.913.461
5432- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	55		514.830
		051-pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit	
		052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	9	Unit	
		053-Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	46	Unit	
5432- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	4	Unit	2.453.384
		051-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	4	Unit	

Lampiran 4 Rincian Lokus Pelaksanaan Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKHTL

PROVINSI	002-PANJANG BATAS KAWASAN HUTAN YANG TELAH DISELESAIKAN		001-INVENTARISASI, VERIFIKASI DAN BATB OBYEK TORA DALAM KAWASAN HUTAN	
	LUAS PENETAPAN (HEKTAR)	PANJANG TRAYEK (KM)	LUAS PENETAPAN (HEKTAR)	PANJANG TRAYEK (KM)
SUMATERA UTARA	725.403	2.674		
SUMATERA BARAT	872.050	2.593		
KALIMANTAN TIMUR			524	55
MALUKU UTARA	1.071.269	4.944		
SULAWESI SELATAN	468.511	1.607	2.500	150
NTB	139	8		
MALUKU	1.125.869	4.122		
PAPUA	2.216.649	2.201		
BANTEN	47.087	4		
DKI JAKARTA	115	9		
JAWA BARAT	981	50		
YOGYAKARTA	406	169		
KEP. RIAU	130.606	1.866		
KEP. BANGKA BELITUNG	42.363	17		
JAMBI	36.264	11		
PAPUA BARAT	667.193	3.799		
ACEH	2.415.752	2.659	5.451	331
RIAU	1.141.915	9.276	1.633	563
LAMPUNG	49.441	386		
BENGKULU	102.434	341		
KALIMANTAN TENGAH	3.755.151	3.604		
SULAWESI TENGGARA	108.558	194		
TOTAL	14.978.156	40.534	10.108	1.099

Lampiran 5 Rincian Lokus Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan SDH di wilayah BPKHTL

PROVINSI	002-DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN DI WILAYAH KERJA BPKHTL
SUMATERA UTARA	2
SUMATERA SELATAN	5
KALIMANTAN BARAT	5
KALIMANTAN UTARA	1
KALIMANTAN SELATAN	4
NTB	3
JAWA TIMUR	3
KEP. RIAU	1
KEP. BANGKA BELITUNG	2
JAMBI	2
NTT	2
GORONTALO	4
SULAWESI TENGAH	4
LAMPUNG	2
BENGKULU	2
SULAWESI TENGGARA	2
TOTAL	44

Lampiran 6 Rincian Lokus Pelaksanaan Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di wilayah UPT BPKHTL

PROVINSI	001-HASIL VERIFIKASI PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KERJA BPKHTL
	(BADAN USAHA)
SUMATERA BARAT	2
SUMATERA SELATAN	3
KALIMANTAN BARAT	1
KALIMANTAN TIMUR	24
KALIMANTAN UTARA	7
KALIMANTAN SELATAN	9
MALUKU UTARA	6
SULAWESI SELATAN	2
NTB	1
MALUKU	1
PAPUA	1
KEP. BANGKA BELITUNG	1
GORONTALO	1
SULAWESI TENGAH	6
PAPUA BARAT	1
RIAU	4
LAMPUNG	2
KALIMANTAN TENGAH	12
SULAWESI TENGGARA	16
TOTAL	100

Lampiran 7 Rincian Lokus Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dampak Lingkungan di wilayah UPT BPKHTL

PROVINSI	002 - Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH (Layanan)
KALIMANTAN BARAT	1
KALIMANTAN TIMUR	1
KALIMANTAN UTARA	1
KALIMANTAN SELATAN	1
BALI	1
NTB	1
BANTEN	1
DKI JAKARTA	1
JAWA BARAT	1
JAWA TENGAH	1
JAWA TIMUR	1
YOGYAKARTA	1
KEP. RIAU	1
KEP. BANGKA BELITUNG	1
JAMBI	1
NTT	1
SULAWESI TENGAH	1
PAPUA BARAT	1
RIAU	1
BENGKULU	1
TOTAL	20